

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT

KABUPATEN PINRANG

2016



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN PINRANG**

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT

KABUPATEN PINRANG

2
0
1
6



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN PINRANG**

Katalog BPS: 4102004.7315

Ukuran Buku: 15 cm x 21 cm

Jumlah Halaman: 104

Naskah:

Veronika Ratih Andriani, SST

Gambar Kulit:

Seksi Nerwilis BPS Kabupaten Pinrang

Diterbitkan oleh:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang

***Boleh dikutip dengan menyebutkan
sumbernya***

Kata Pengantar

Indikator Kesejahteraan Rakyat (Inkesra) Kabupaten Pinrang tahun 2016 memuat berbagai indikator antara lain: indikator Kependudukan, Keluarga Berencana (KB), Pendidikan, Kesehatan, Ketenagakerjaan, Perumahan dan indikator-indikator lainnya.

Publikasi ini merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan konsumen akan data yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat di wilayah Kabupaten Pinrang tahun 2015. Selain itu, diharapkan publikasi ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan masukan untuk pembangunan daerah, khususnya di bidang sosial.

Publikasi ini masih jauh dari sempurna. Saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan guna penyempurnaan publikasi berikutnya.

Pinrang, September 2016

BPS KABUPATEN PINRANG
K e p a l a,

Ir. H. Yunus
NIP. 19650317 199301 1001

Indikator Kesejahteraan Rakyat 2016

<https://pinrangkab.bps.go.id>

Daftar Isi

Halaman

Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vi
Bab I	
Pendahuluan	1
1.1 Konsep Dan Definisi	2
Bab II	
Kependudukan	7
2.1 Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio)	8
2.2 Laju Pertumbuhan Penduduk	9
2.3 Persebaran dan Komposisi Penduduk	10
2.4 Angka Beban Ketergantungan (ABT)	13
Bab III	
Keluarga Berencana	17
3.1 Status Perkawinan	17
3.2 Umur Kehamilan Pertama	19
3.3 Pemakaian Alat/Cara KB	21

3.4 Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (ALH)	25
Bab IV	
Pendidikan	30
4.1 Angka Melek Huruf (AMH)	31
4.2 Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	32
Bab V	
Kesehatan	36
5.1 Angka Kesakitan/ Morbiditas	37
5.2 Penolong Persalinan	39
5.3 Pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif	41
5.4 Imunisasi	44
Bab VI	
Ketenagakerjaan	49
6.1 Konsep Ketenagakerjaan	50
6.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	51
6.3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	54
6.4 Bekerja	57
6.5 Jumlah Jam Kerja	63
Bab VII	
Fasilitas Perumahan	66
7.1 Kualitas Rumah Tinggal	66
7.1.1 Jenis Dinding Rumah	67

7.1.2 Jenis Atap	68
7.1.3 Jenis dan Luas Lantai	69
7.2 Fasilitas Rumah	70
7.2.1 Air Minum Bersih	70
7.2.2 Sumber Penerangan Listrik	72
7.2.3 Tempat Pembuangan Tinja	73
7.3 Status Kepemilikan Rumah	75
Bab VIII	
Konsumsi Rumah Tangga dan Kemiskinan	78
8.1 Pengeluaran Konsumsi Makanan dan Non Makanan	79
8.2 Penduduk Miskin	83
Daftar Pustaka	88

Daftar Tabel

Halaman

Tabel 1. Jumlah dan Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kabupaten Pinrang Tahun 2013-2015	8
Tabel 2. Persentase Penduduk Kabupaten Pinrang Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2014-2015	13
Tabel 3. Persentase Ijazah/STTB yang dimiliki Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas Menurut Jenis Kelamin, 2015	33
Tabel 4. TPAK Kabupaten Pinrang Menurut Wilayah dan Jenis Kelamin, Tahun 2014-2015	53
Tabel 5. TPT Kabupaten Pinrang Menurut Wilayah, Jenis Kelamin, dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2015	55
Tabel 6. Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan (Rupiah) Menurut Kelompok Barang Dan Daerah Tempat Tinggal, Maret 2015	81
Tabel 7. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Pinrang Tahun 2012-2014	85

Daftar Gambar

Halaman

Gambar 1. Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Pinrang Tahun 2015	9
Gambar 2. Piramida Penduduk Kabupaten Pinrang Tahun 2015	11
Gambar 3. Persentase Penduduk Umur 10 Tahun Keatas Menurut Jenis Kelamin dan Status Perkawinan, 2015	18
Gambar 4. Persentase Wanita Usia 15-49 Tahun ke Atas yang Pernah Kawin Menurut Umur Kehamilan Pertama, 2015	20
Gambar 5. Prevalensi Pemakaian Alat/Cara KB Perempuan Berstatus Kawin Umur 15-49 Tahun 2015 (%)	22
Gambar 6. Prevalensi Pemakaian Alat/Cara KB Perempuan Berstatus Kawin Umur 15-49 Tahun 2015	23
Gambar 7. Persentase Perempuan Pernah Kawin (WPK) Menurut Jumlah Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH), Tahun 2015	26
Gambar 8. Angka Melek Huruf (AMH) dan Angka Buta Huruf (ABH) menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Pinrang Tahun 2015	31

Gambar 9. Persentase Ijazah/STTB yang dimiliki Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas Menurut Jenis Kelamin, 2015	32
Gambar 10. Persentase Keluhan Kesehatan yang Diderita Selama Sebulan Terakhir, 2015	37
Gambar 11. Persentase Jenis Keluhan Kesehatan yang Diderita Penduduk Selama Sebulan Terakhir Menurut Jenis Kelamin, 2015	38
Gambar 12. Persentase Penduduk yang Menderita Gangguan Kesehatan Sebulan yang Lalu Menurut Lamanya Hari Gangguan Kesehatan, Jenis Kelamin, 2015	38
Gambar 13. Persentase Balita Menurut Penolong Kelahiran Terakhir, 2015	40
Gambar 14. Persentase Balita Menurut Penolong Kelahiran Terakhir, 2015	41
Gambar 15. Persentase Balita umur 0-23 bulan Menurut Pemberian Air Susu Ibu (ASI), 2015	42
Gambar 16. Persentase Balita Yang Masih Diberi Air Susu Ibu (ASI) Menurut Lama Diberi ASI dan Jenis Kelamin, 2015	43
Gambar 17. Persentase Balita Menurut Pemberian Imunisasi, 2015	45
Gambar 18. Persentase Balita Menurut Pemberian Imunisasi dan Jenis Kelamin, 2015	45
Gambar 19. Diagram Ketenagakerjaan, BPS	51
Gambar 20. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Total, serta Persentase Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin, 2015	52

Gambar 21. Persentase Penduduk 15 Tahun Keatas yang Termasuk Angkatan Kerja, 2015	54
Gambar 22. Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Utama, 2015	58
Gambar 23. Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Wilayah dan Lapangan Usaha Utama, 2015	59
Gambar 24. Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Jenis Kelamin dan Lapangan Usaha Utama, 2015	60
Gambar 25. Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama, 2015	61
Gambar 26. Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama, 2015	62
Gambar 27. Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja Selama Seminggu, 2015	63
Gambar 28. Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Dinding Terluas, 2015	67
Gambar 29. Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Atap Terluas, 2015	68
Gambar 30. Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Lantai Terluas, 2015	69
Gambar 31. Persentase Rumah Tangga Menurut Penggunaan Air Minum, 2015	71
Gambar 32. Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air untuk Memasak, 2015	72

Gambar 33. Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan Listrik, 2015	73
Gambar 34. Persentase Rumah Tangga Menurut Tempat Pembuangan Akhir Tinja, 2015	74
Gambar 35. Persentase Rumah Tangga Menurut Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal, 2015	75
Gambar 36. Persentase Konsumsi makanan dan non makanan penduduk Kabupaten Pinrang Tahun 2013-2015	80
Gambar 37. Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Pinrang Tahun 2009-2014	84



Indikator Kesejahteraan Rakyat 2016

<https://pinrangkab.bps.go.id>

Bab I

Pendahuluan

Pembangunan nasional bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan mempunyai makna yang luas, tidak hanya terkait dengan terpenuhinya kebutuhan seperti sandang, pangan dan papan tetapi juga menyangkut pemenuhan aspek kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup bahkan rasa aman. Oleh karena itu, indikator pertumbuhan ekonomi atau pendapatan per kapita saja tidak cukup untuk mengukur keberhasilan pembangunan suatu wilayah. Diperlukan indikator-indikator lain seperti banyaknya penduduk yang bersekolah, tingkat kesehatan masyarakat, dan tingkat kemiskinan untuk mendapatkan gambaran kesejahteraan secara utuh.

Ketersediaan data-data terkait sosial dan ekonomi sangat penting untuk mengevaluasi sejauh mana tujuan pembangunan telah dicapai pemerintah suatu daerah. Badan Pusat Statistik (BPS) diberi amanat oleh undang-undang untuk melaksanakan kegiatan statistik dasar. Statistik dasar adalah menyediakan data-data sosial maupun ekonomi melalui berbagai survei dan sensus. Hasil dari kegiatan tersebut kemudian dibukukan menjadi beragam publikasi, salah satunya Indikator Kesejahteraan Rakyat (Inkesra).

Publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat menyajikan berbagai indikator dasar yang terkait dengan kependudukan, keluarga berencana (KB), pendidikan,

kesehatan, ketenagakerjaan, perumahan dan pengeluaran konsumsi. Data-data yang ditampilkan merupakan hasil dari survei-survei BPS, diantaranya Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2015 dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2015.

1.1 Konsep Dan Definisi

Untuk menghindari kesalahpahaman atas konsep yang digunakan, BPS telah menentukan konsep dan definisi untuk setiap variabel yang akan dikumpulkan. Definisi tersebut baku dan berlaku secara umum untuk setiap publikasi yang dikeluarkan BPS.

Konsep	Definisi
Rumah Tangga Biasa	adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus, dan biasanya makan bersama dari satu dapur. Yang dimaksud satu dapur adalah mengurus kebutuhan sehari-hari bersama menjadi satu
Kepadatan Penduduk	adalah rata-rata banyaknya penduduk per km ²
Rasio Jenis Kelamin	adalah perbandingan antara penduduk laki-laki dengan perempuan dikali 100
Kawin	adalah mempunyai istri/suami pada saat pencacahan, baik tinggal bersama maupun terpisah. Tidak saja mereka yang kawin sah secara hukum, tetapi juga mereka yang hidup bersama dan oleh masyarakat sekelilingnya dianggap sebagai suami istri
Cerai Hidup	adalah berpisah sebagai suami/istri karena bercerai dan belum kawin lagi. Dalam hal ini termasuk mereka yang mengaku cerai walaupun belum resmi secara hukum. Sebaliknya tidak termasuk mereka yang hanya hidup

	terpisah tetapi masih berstatus kawin, misalnya suami/istri ke tempat lain karena mencari pekerjaan
Cerai Mati	adalah ditinggal mati oleh suami/istrinya dan belum kawin lagi
Metode Kontrasepsi	adalah alat/cara pencegah kehamilan
Sekolah	adalah kegiatan bersekolah di sekolah formal mulai dari pendidikan sekolah dasar, menengah, dan perguruan tinggi, termasuk pendidikan yang disamakan
Tidak atau Belum Pernah Sekolah	adalah tidak atau belum pernah sekolah di sekolah formal, misalnya tamat/belum tamat Taman Kanak-Kanak tetapi tidak melanjutkan ke SD
Masih Bersekolah	adalah sedang mengikuti pendidikan pada jenjang pendidikan dasar, menengah, atau perguruan tinggi
Tidak Sekolah Lagi	adalah pernah mengikuti pendidikan dasar, menengah, atau perguruan tinggi tetapi pada saat pencacahan tidak bersekolah lagi
Melek Huruf	adalah penduduk 10 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya
Angka Partisipasi Sekolah	adalah partisipasi penduduk usia tertentu yang masih sekolah atau jenjang pendidikan tertentu terhadap seluruh penduduk pada umur tersebut
Keluhan Kesehatan	adalah keadaan seseorang yang merasa terganggu oleh kondisi kesehatan, kejiwaan, atau hal lain. Seseorang yang menderita penyakit kronis dianggap mempunyai keluhan kesehatan walaupun pada waktu survei yang bersangkutan tidak kambuh penyakitnya
Penduduk Usia Kerja	Adalah penduduk yang berusia 10 tahun keatas
Angkatan Kerja	Adalah penduduk usia 10 tahun keatas dan selama seminggu yang lalu mempunyai pekerjaan, baik yang bekerja maupun sementara tidak bekerja karena sesuatu sebab seperti menunggu panen, sedang cuti dan sedang

	menunggu pekerjaan berikutnya. Disamping itu mereka yang tidak mempunyai pekerjaan tetapi sedang mencari pekerjaan
Angkatan Kerja	Adalah penduduk usia 10 tahun keatas dan selama seminggu yang lalu mempunyai pekerjaan, baik yang bekerja maupun sementara tidak bekerja karena sesuatu sebab seperti menunggu panen, sedang cuti dan sedang menunggu pekerjaan berikutnya. Disamping itu mereka yang tidak mempunyai pekerjaan tetapi sedang mencari pekerjaan
Bukan Angkatan Kerja	mereka yang berusia 10 tahun keatas, selama seminggu yang lalu hanya bersekolah, mengurus rumah tangga, dan tidak melakukan suatu kegiatan yang tidak dapat dimasukkan dalam kategori bekerja/mencari pekerjaan
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Perbandingan antara penduduk usia 10 tahun keatas (usia kerja) dengan angkatan kerja
Penganggur	Adalah mereka yang termasuk angkatan kerja yang tidak bekerja tetapi mencari pekerjaan
Bekerja	Kegiatan melakukan pekerjaan paling sedikit satu jam berturut-turut selama seminggu dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan. Pekerja keluarga yang tidak dibayar termasuk kelompok penduduk yang bekerja
Angka Beban Tanggungan	Angka yang menyatakan perbandingan antara penduduk usia non produktif (usia dibawah 15 tahun dan usia 65 tahun keatas) dengan penduduk usia produktif (antara usia 15 tahun sampai usia 64 tahun) dikali 100

<https://pinrangkab.bps.go.id>

2015

Penduduk Perempuan Lebih banyak daripada Penduduk Laki-laki



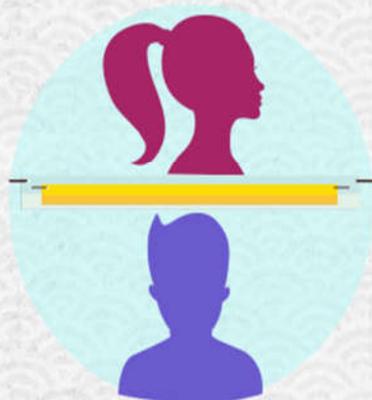
177.910 jiwa



188.879 jiwa



366.789 jiwa



Sex Rasio/Rasio jenis kelamin
94,19

berarti dari setiap 100 penduduk wanita terdapat sekitar 94 penduduk laki-laki



Bab II

Kependudukan

Penduduk merupakan modal dasar pembangunan, namun di sisi lain penduduk juga merupakan beban untuk mencapai pembangunan ekonomi. Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dikhawatirkan dapat menimbulkan masalah baik sosial maupun ekonomi. Jumlah penduduk yang semakin meningkat menuntut pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, papan,

Ketidakeimbangan antara pertumbuhan penduduk dengan pertumbuhan produksi pangan akan mempengaruhi kualitas hidup manusia. Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali juga berpotensi menghambat pencapaian kesejahteraan masyarakat. Jumlah penduduk di suatu wilayah mempengaruhi taraf kehidupan ekonomi masyarakat di wilayah tersebut. Jika suatu wilayah memiliki jumlah penduduk yang besar sementara pendapatan regional di wilayah tersebut relatif kecil akan mengakibatkan pendapatan per kapita wilayah tersebut rendah.

Permasalahan pemenuhan kebutuhan pokok sebagai akibat dari pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali serta kesejahteraan masyarakat yang rendah akan mendorong munculnya permasalahan-permasalahan sosial. Ketimpangan ekonomi, kurangnya lapangan pekerjaan dan kemiskinan merupakan beberapa faktor yang dapat memicu tindak kriminalitas.

Permasalahan kependudukan mencakup aspek yang sangat luas, baik sosial maupun ekonomi. Penanganan permasalahan juga membutuhkan koordinasi lintas sektoral agar dapat dicapai penyelesaian yang komprehensif. Mengingat pentingnya aspek penduduk dalam pembangunan, maka diperlukan dukungan data-data kependudukan dalam perencanaan maupun evaluasi pembangunan. Bab ini akan membahas berbagai indikator dasar kependudukan yang meliputi jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, persebaran dan komposisi penduduk, serta angka beban ketergantungan.

2.1 Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio)

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk pada tahun 2015 jumlah penduduk Kabupaten Pinrang tercatat sebesar 366.789 jiwa dengan rincian laki-laki 177.910 jiwa dan perempuan 188.879 jiwa, serta 85.338 rumah tangga. Rasio jenis kelamin 94,19 yang berarti dari setiap 100 penduduk perempuan terdapat sekitar 94 penduduk laki-laki. Hal ini menunjukkan proporsi penduduk laki-laki terhadap perempuan yang semakin menurun dari tahun 2012 ke tahun 2015.

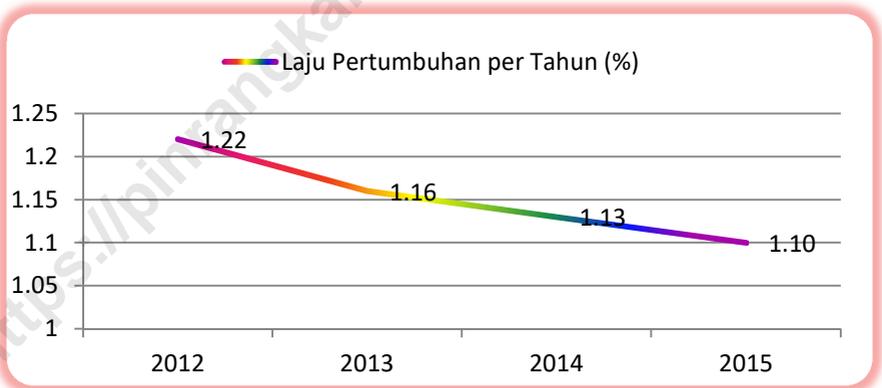
Tabel 1. Jumlah dan Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kabupaten Pinrang Tahun 2013-2015

Tahun	Jumlah Penduduk (ribu jiwa)	Rasio Jenis Kelamin
(1)	(2)	(4)
2013	361,3	94,06
2014	364,1	94,07
2015	366,8	94,19

Sumber : Proyeksi Penduduk Kabupaten Pinrang 2010-2020

2.2 Laju Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk adalah salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial ekonomi disuatu daerah. Indikator ini sangat berguna untuk memprediksi jumlah penduduk di suatu wilayah di masa yang akan datang. Dengan diketahuinya jumlah penduduk yang akan datang, dapat diketahui pula kebutuhan dasar penduduk di wilayah tersebut di berbagai bidang. Akan tetapi, prediksi jumlah penduduk dengan cara seperti ini belum dapat menunjukkan karakteristik penduduk secara rinci di masa yang akan datang.



Gambar 1. Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Pinrang Tahun 2015

Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Pinrang terus menerus menurun sepanjang periode 2012-2015. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Pinrang tahun 2015 sebesar 1,1%. Hal ini bermakna setiap tahun antara tahun 2000 dengan tahun 2015 jumlah penduduk Indonesia bertambah sebesar 1,1%. Meskipun menurun, program-

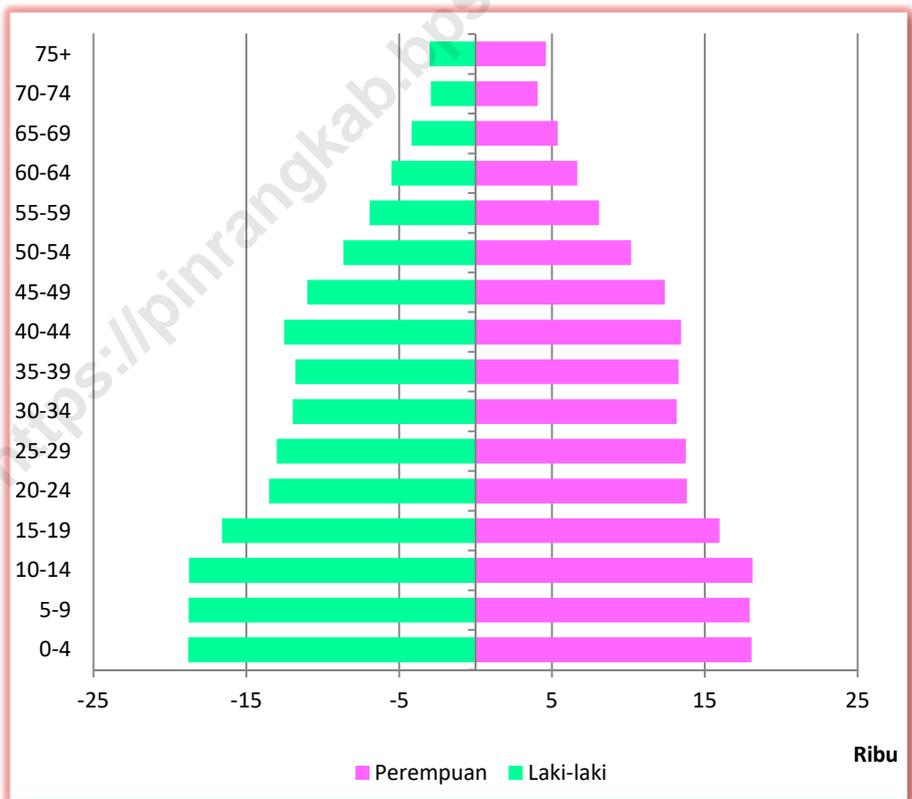
program pengendalian laju pertumbuhan penduduk melalui program-program Keluarga Berencana (KB) perlu dilanjutkan untuk memastikan bahwa pertumbuhan penduduk tetap terkendali.

2.3 Persebaran dan Komposisi Penduduk

Persebaran penduduk yang tidak merata merupakan permasalahan di hampir seluruh wilayah Indonesia termasuk di Kabupaten Pinrang. Perkembangan saat ini menunjukkan bahwa konsentrasi penduduk berada di wilayah perkotaan. Hal ini dipicu oleh keinginan masyarakat untuk mencari kehidupan yang lebih baik di perkotaan yang menyediakan fasilitas yang lebih baik. Kondisi yang sama juga terjadi di Kabupaten Pinrang dimana persebaran penduduk terpusat di ibukota kabupaten dan sekitarnya yaitu Kecamatan Watang Sawitto, Paleteang dan Tiroang.

Tahun 2015, kepadatan penduduk rata-rata di Kabupaten Pinrang adalah 186,97 jiwa per km². Angka ini menunjukkan bahwa terdapat sekitar 186 sampai 187 jiwa pada tiap km² luas wilayah di Kabupaten Pinrang. Kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Lembang. Meskipun merupakan kecamatan yang terluas dan memiliki potensi perkebunan, namun secara geografis Kecamatan Lembang terdiri atas daerah pegunungan dengan infrastruktur yang belum memadai, sehingga banyak penduduk yang memilih menetap di daerah lain daripada Lembang.

Komposisi penduduk menurut kelompok umur dapat menggambarkan fertilitas (kelahiran), migrasi (perpindahan penduduk), serta mortalitas (kematian). Piramida penduduk Kabupaten Pinrang tahun 2015 termasuk jenis piramida penduduk muda (expansive). Bentuk piramida penduduk yang menyerupai segitiga menunjukkan tingkat fertilitas yang relatif tinggi dan mortalitas yang rendah. Yaitu memiliki bentuk yang lebar pada kelompok umur 0-19 tahun, sedangkan pada usia tua sangat sedikit.



Gambar 2. Piramida Penduduk Kabupaten Pinrang Tahun 2015

Balok piramida yang memanjang pada kelompok umur 0-4 tahun menunjukkan fertilitas yang tinggi. Balok piramida yang memendek pada kelompok umur 15-29 tahun mengindikasikan adanya migrasi penduduk keluar dari Kabupaten Pinrang untuk berbagai alasan, misalnya melanjutkan pendidikan, mencari pekerjaan, maupun perkawinan. Bentuk balok piramida semakin memendek pada kelompok umur 30-39 tahun. Hal itu menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang melakukan migrasi keluar semakin besar. Tingkat mortalitas yang tinggi terlihat dari bentuk balok piramida yang semakin mengecil dari kelompok umur 50-75+. Pada kelompok umur 40-44 tahun balok piramida terlihat memanjang yang mengindikasikan adanya migrasi masuk ke Kabupaten Pinrang. Migrasi masuk ini umumnya adalah penduduk yang kembali dari perantauan dengan berbagai alasan, misalnya ingin mengurus orang tua atau mereka tidak dapat lagi bekerja di perantauan karena usia yang semakin tua.

Jika diamati lebih dalam, terlihat bahwa pada kelompok umur berakhir 0 dan 5 balok piramida cenderung lebih menonjol dibandingkan dengan kelompok umur lainnya. Fenomena ini menunjukkan adanya kesalahan pelaporan umur. Ketika seseorang tidak mengingat secara pasti tanggal lahirnya, maka ada kecenderungan umur yang diingat berakhir 0 atau 5. Hal ini merupakan kesalahan yang tidak dapat dihindari dikarenakan pencacatan kelahiran dan kematian di Indonesia masih belum dilakukan dengan baik.

2.4 Angka Beban Ketergantungan (ABT)

Angka Beban Ketergantungan (ABT) merupakan perbandingan antara jumlah penduduk usia non produktif (0-14 tahun dan 65 tahun keatas) dengan jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun). Penduduk usia produktif disebut juga angkatan kerja yang dapat memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sebaliknya penduduk usia non produktif adalah bukan angkatan kerja yang tidak dapat memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, ABT dapat menjadi indikator kasar kondisi ekonomi suatu wilayah.

Tabel 2. Persentase Penduduk Kabupaten Pinrang Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2014-2015

Kelompok Umur	2014			2015		
	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0-14	15,52	14,92	30,44	15,35	14,76	30,11
15-64	30,26	32,83	63,09	30,40	32,92	63,31
65+	2,70	3,77	6,47	2,75	3,82	6,58
ABT Muda	51,29	45,45	48,25	50,51	44,83	47,56
ABT Tua	8,92	11,48	10,26	9,06	11,61	10,39
ABT	60,21	56,94	58,51	59,57	56,44	57,95

Sumber : Proyeksi Penduduk 2010-2035 (diolah)

Semakin tinggi ABT, semakin tinggi pula beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi, demikian

juga sebaliknya. ABT sebesar 57,95 persen pada tahun 2015 di Kabupaten Pinrang menunjukkan bahwa dari setiap 100 orang penduduk umur produktif menanggung 57 hingga 58 penduduk umur tidak produktif. Nilai ABT Kabupaten Pinrang termasuk dalam kategori tinggi.

Berdasarkan tabel di atas, ABT Kabupaten Pinrang pada tahun 2015 menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini dipengaruhi oleh dua faktor yaitu peningkatan proporsi penduduk usia produktif dan penurunan proporsi penduduk usia non produktif (kelompok 0-14 tahun) pada tahun 2015. Penurunan ABT tentu menjadi sinyal yang baik bagi pemerintah karena menunjukkan penurunan beban ekonomi. Peningkatan proporsi penduduk usia produktif dari 63,09 persen pada tahun 2014 menjadi 63,31 persen pada tahun 2015 menunjukkan peningkatan jumlah penduduk yang potensial sebagai modal dasar pembangunan di Kabupaten Pinrang. Di sisi lain, keberhasilan pengendalian angka kelahiran juga akan mendorong menurunnya ABT dengan mengurangi proporsi penduduk muda yang belum produktif.

Sementara itu, jika dilihat dari jenis kelaminnya, terlihat bahwa ABT untuk penduduk laki-laki selalu lebih tinggi daripada penduduk perempuan, baik pada tahun 2014 maupun tahun 2015. Bila diamati lebih mendalam, ABT laki-laki pada usia 0-14 tahun (ABT Muda) lebih tinggi dibandingkan perempuan. Hal ini disebabkan karena jumlah penduduk laki-laki di usia muda lebih besar daripada penduduk perempuan sedangkan pada saat usia produktif cenderung menurun, baik karena migrasi maupun kematian. Sementara itu, pada

usia 65 tahun ke atas nilai ABT (ABT Tua) untuk perempuan jauh lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Hal ini disebabkan oleh usia harapan hidup perempuan yang lebih panjang daripada laki-laki.

<https://pinrangkab.bps.go.id>

STATUS PERKAWINAN 2015

Tahun lalu
peringkat 5,
Tahun 2015 Naik,
PERINGKAT KE-4

Mayoritas Penduduk Umur 10 Tahun
Keatas Berstatus Kawin



Belum Kawin



Kawin

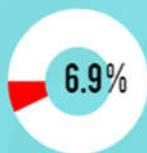


Cerai Hidup



Cerai Mati

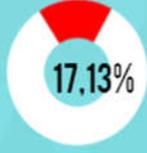
Umur KEHAMILAN Pertama



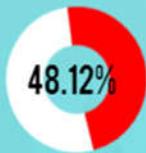
TIDAK PERNAH
HAMIL



<17
Tahun



17-18
Tahun



19-24
Tahun



>24
Tahun

Terlalu Muda,
Mental & Sistem
Reproduksi Belum Siap



Bab III

Keluarga Berencana

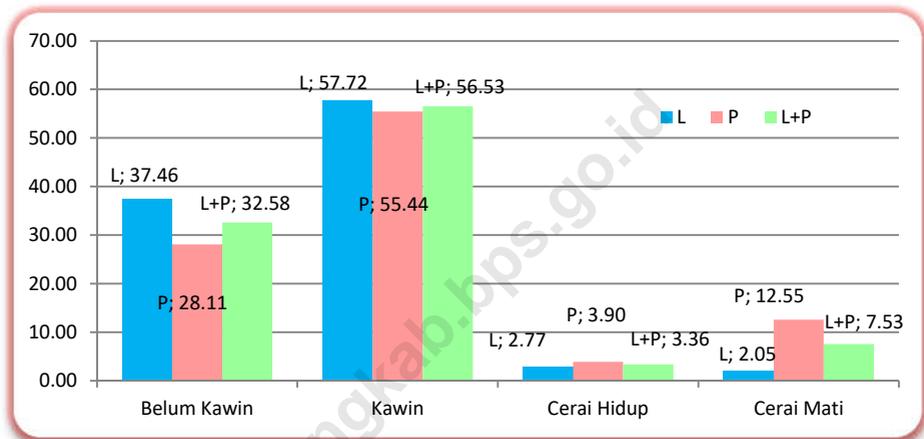
Undang-Undang N0. 52 Tahun 2009 menekankan bahwa Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga telah mengamanatkan perlunya pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas dan pengarahannya mobilitas penduduk agar mampu menjadi sumberdaya yang tangguh bagi pembangunan dan ketahanan nasional.

Salah satu kebijakan yang diambil pemerintah untuk menekan laju pertumbuhan penduduk Indonesia adalah dengan menerapkan program Keluarga Berencana (KB). Program KB merupakan gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran bayi melalui penggunaan alat-alat kontrasepsi seperti kondom, spiral, IUD, dan sebagainya. Selain itu, melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 7 ayat 1, pemerintah menetapkan umur minimum perkawinan pada perempuan 16 tahun, sedangkan laki-laki 19 tahun.

3.1 Status Perkawinan

Konsep perkawinan yang digunakan dalam pengumpulan data demografi BPS lebih difokuskan pada kondisi dimana laki-laki dan perempuan hidup bersama untuk waktu yang lama baik yang dikukuhkan dalam perkawinan yang sah menurut Undang-undang (de Jure) maupun tanpa pengesahan perkawinan (de Facto). Hal ini

dilakukan terutama untuk memperoleh pendekatan yang lebih tepat mengenai keterkaitan antara status perkawinan dengan tingkat fertilitas yang sangat dipengaruhi oleh lamanya ikatan perkawinan.



Gambar 3. Persentase Penduduk Umur 10 Tahun Keatas Menurut Jenis Kelamin dan Status Perkawinan, 2015

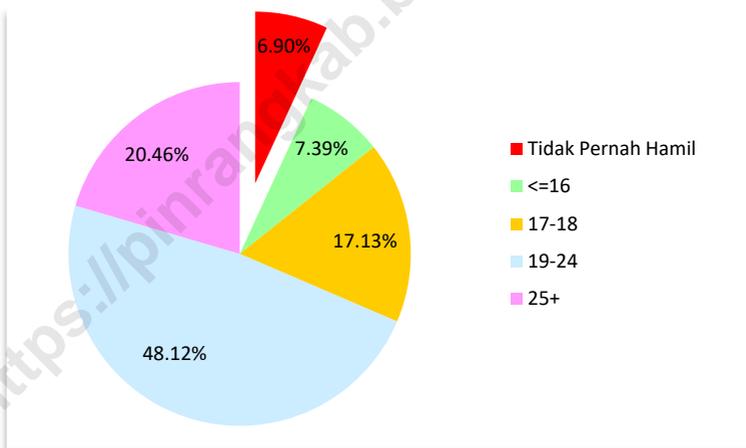
Menurut status perkawinannya, penduduk Kabupaten Pinrang tahun 2015 yang berstatus kawin sebanyak 56,53 persen; belum kawin 32,58 persen; cerai mati 7,53 persen; dan cerai hidup 3,36 persen. Persentase penduduk Kabupaten Pinrang yang berstatus kawin untuk laki-laki adalah 57,72 persen, lebih besar dibandingkan persentase perempuan yaitu 55,44 persen. Demikian pula untuk penduduk yang belum kawin, persentase penduduk laki-laki belum kawin (37,46persen) lebih besar dibanding perempuan belum kawin (28,11persen). Sementara itu, persentase penduduk perempuan yang berstatus cerai hidup maupun cerai mati lebih besar dibanding penduduk laki-laki dengan status sama.

Persentase penduduk perempuan berstatus cerai mati dan cerai hidup lebih besar dibandingkan penduduk laki-laki. Sedangkan untuk yang berstatus kawin, persentase laki-laki kawin lebih besar dibandingkan perempuan. Hal ini menunjukkan fenomena bahwa laki-laki yang telah cerai hidup ataupun cerai mati, tidak berselang lama kemudian menikah kembali sedangkan perempuan lebih banyak yang mempertahankan status jandanya, baik karena cerai hidup maupun cerai mati. Fenomena lain yang tampak dari data diatas adalah perempuan lebih cepat menikah dari pada laki-laki yang ditunjukkan oleh persentase perempuan berstatus belum kawin lebih kecil dibandingkan laki-laki.

3.2 Umur Kehamilan Pertama

Laju pertumbuhan penduduk sangat dipengaruhi oleh tingkat fertilitas yang erat kaitannya dengan umur perkawinan pertama. Umur perkawinan pertama sebagai umur pertama kali menikah menandakan dimulainya masa reproduksi, karena tentunya kehamilan akan terjadi setelah perkawinan. Terdapat hubungan negatif antara umur perkawinan pertama dengan tingkat fertilitas. Semakin muda umur perkawinan pertama seorang perempuan, maka semakin tinggi pula fertilitas perempuan tersebut karena masa konsepsi yang semakin panjang.

Indikator umur kehamilan pertama pada perempuan penting bagi penentuan kebijakan yang terkait kependudukan terutama untuk program-program peningkatan kualitas keluarga dan perencanaan keluarga. Kehamilan pada umur terlalu muda akan berdampak pada kualitas keluarga serta resiko kesehatan dalam kehamilan dan persalinan. Data mengenai jumlah pasangan usia subur (persentase perempuan usia subur yang menikah) juga akan memudahkan perencanaan program KB untuk mempersiapkan pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi.



Gambar 4. Persentase Wanita Usia 15-49 Tahun ke Atas yang Pernah Kawin Menurut Umur Kehamilan Pertama, 2015

Sebagian besar perempuan di Kabupaten Pinrang hamil pertama kali pada umur yang cukup ideal yaitu pada umur 19 hingga 24 tahun, sebanyak 48,12 persen. Persentase perempuan di Kabupaten Pinrang yang hamil pada umur 25 tahun ke atas yaitu 20,46 persen, pada umur 17-18 tahun adalah 17,13 persen perempuan. Fenomena kehamilan di

bawah umur (16 tahun ke bawah) masih terjadi di Kabupaten Pinrang. Sebesar 7,39 persen perempuan hamil dibawah umur 16 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa aturan yang digalakkan pemerintah masih belum ditaati sepenuhnya baik oleh masyarakat, maupun oleh instansi penyelenggara perkawinan. Sehingga diperlukan penyuluhan yang lebih intensif serta kesadaran masyarakat itu akan pentingnya ditetapkan batasan umur tersebut.

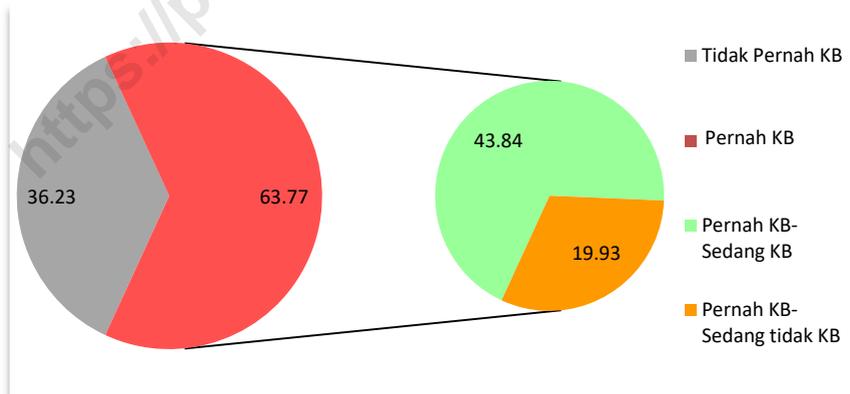
Menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 usia minimal perempuan untuk menikah adalah 16 tahun, sedangkan menurut Undang-undang Perlindungan Anak usia minimal perempuan untuk menikah adalah 18 tahun. Sementara itu, menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) umur ideal bagi perempuan untuk menikah adalah 21-25 tahun. Perkawinan di pada rentang usia ini, lebih baik dari sisi kesehatan reproduksi maupun mental. Karena pada usia tersebut, organ-organ reproduksi perempuan dianggap lebih siap untuk menghadapi resiko persalinan, serta lebih siap mental untuk merawat dan membesarkan anaknya tersebut.

3.3 Pemakaian Alat/Cara KB

Pengendalian laju pertumbuhan penduduk di Indonesia dilakukan dengan cara menekan angka fertilitas melalui program Keluarga Berencana (KB). Program KB memberikan penyuluhan mengenai kesehatan reproduksi serta pentingnya pengaturan jarak kehamilan dan

jumlah kelahiran dengan menggunakan alat kontrasepsi. Alat kontrasepsi dapat digunakan oleh laki-laki maupun perempuan. Namun penggunaan alat kontrasepsi di Indonesia mayoritas adalah perempuan.

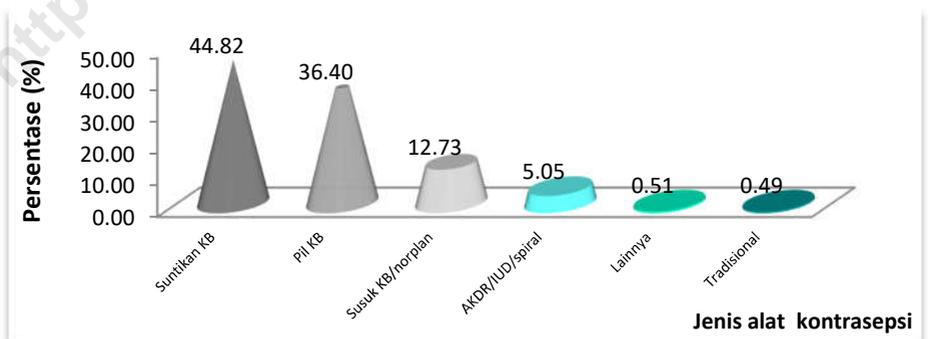
Angka prevalensi pemakaian kontrasepsi adalah angka yang menunjukkan berapa banyaknya Pasangan Usia Subur (PUS) yang sedang memakai kontrasepsi pada saat pencacahan dibandingkan dengan seluruh PUS di suatu wilayah. Informasi tentang besarnya prevalensi KB sangat bermanfaat untuk menetapkan kebijakan pengendalian kependudukan serta penyediaan pelayanan KB baik dalam bentuk mempersiapkan pelayanan kontrasepsi, serta pelayanan konseling untuk menampung kebutuhan dan menanggapi keluhan pemakaian kontrasepsi.



Gambar 5. Prevalensi Pemakaian Alat/Cara KB Perempuan Berstatus Kawin Umur 15-49 Tahun 2015 (%)

Mayoritas perempuan pernah kawin (WPK) di Kabupaten Pinrang pernah menggunakan alat kontrasepsi (63,77 persen), sementara sisanya yaitu 36,23 persen tidak pernah menggunakan alat kontrasepsi. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas PUS di Kabupaten Pinrang menyadari akan pentingnya penggunaan alat kontrasepsi untuk mengatur jarak kehamilan maupun membatasi jumlah kelahiran. Dari 63,77 persen WPK yang pernah menggunakan KB; sebanyak 43,84 persen masih menggunakan alat kontrasepsi hingga saat ini dan 19,93 persen sisanya tidak menggunakan lagi.

Prevalensi Pemakaian Alat Kontrasepsi di Kabupaten Pinrang pada tahun 2015 adalah 43,84 persen. Hal ini berarti sekitar 4 sampai 5 dari 10 PUS menggunakan alat kontrasepsi. Alasan WPK yang sedang tidak ber-KB diantaranya karena telah menginjak masa menopause sehingga tidak akan mungkin hamil lagi atau karena pasangannya tidak tinggal di Kabupaten Pinrang (Susenas, 2015).



Gambar 6. Prevalensi Pemakaian Alat/Cara KB Perempuan Berstatus Kawin Umur 15-49 Tahun 2015

Gambar 6 menampilkan jenis alat kontrasepsi yang digunakan oleh WPK yang sedang KB. Jenis alat kontrasepsi yang paling banyak dipakai di Kabupaten Pinrang adalah suntik KB yaitu 44,82 persen WPK. Suntik KB dinilai sebagai alat kontrasepsi yang mudah penggunaannya, karena disuntikkan hanya setiap 3 bulan, 10 minggu atau setiap bulan.

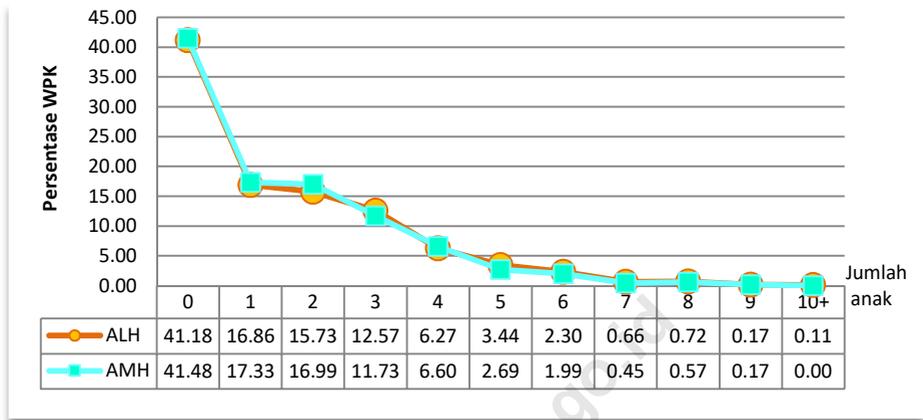
Alat kontrasepsi kedua yang digemari adalah pil KB. pil KB juga termasuk aman dan mudah digunakan, harganya terjangkau, serta efektif mencegah kehamilan. Pil KB digunakan oleh 36,40 persen WPK dan sebanyak 12,73 persen WPK menggunakan susuk KB. Kedua jenis alat kontrasepsi tersebut termasuk kontrasepsi sementara sedangkan kontrasepsi permanen misalnya MOW/tubektomi, MOP/Vasektomi dan kondom, termasuk di kategori 'lainnya' merupakan alat kontrasepsi yang sedikit digunakan (0,51 persen). Sementara yang paling sedikit adalah cara tradisional (0,49 persen).

MOP adalah Metoda Operasi Laki-laki atau Vasektomi yang dilakukan dengan cara operasi pemotongan atau memutuskan saluran sperma pada laki-laki, sehingga pasangannya tidak akan mengalami kehamilan. PUS yang telah menggunakan MOP/Vasektomi dan MOW/Tubektomi akan secara permanen tidak memiliki keturunan lagi. Biasanya, jenis kontrasepsi ini dipilih oleh PUS yang telah merasa cukup dengan jumlah anak yang dimilikinya serta tidak berniat menambah anak lagi. Atau terpaksa dilakukan oleh PUS disebabkan penyakit tertentu yang menjangkit organ reproduksinya.

Kontrasepsi tradisional masih digunakan oleh 0,49 persen WPK di Kabupaten Pinrang. Cara tradisional tradisional umumnya dipilih oleh PUS dengan tingkat pendidikan yang tinggi yang mengkhawatirkan efek samping dari alat kontrasepsi. Namun, cara ini memiliki tingkat kegagalan yang cukup tinggi jika tidak diaplikasikan secara tepat.

3.4 Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH)

Gambar 7 menunjukkan persentase WPK menurut jumlah Anak Lahir Hidup (ALH) yang ditunjukkan oleh titik berwarna kuning dan Anak Masih Hidup (AMH) yang ditunjukkan oleh titik berwarna biru muda. Secara umum terlihat bahwa kurva ALH dan AMH terus menerus. Penurunan terbesar terlihat pada jumlah anak 0 ke jumlah anak 1. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar WPK belum memiliki anak, diikuti WPK dengan jumlah anak 1, dan seterusnya dengan persentase WPK yang semakin sedikit pada jumlah anak yang semakin besar.



Gambar 7. Persentase Perempuan Pernah Kawin (WPK) Menurut Jumlah Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH), Tahun 2015

Semakin besar jarak ALH dan AMH menunjukkan semakin besar pula tingkat mortalitas di suatu wilayah pada waktu tertentu. Sebagai contoh, persentase WPK yang tidak memiliki Anak Lahir Hidup (ALH nol) adalah 41,18 persen. Sedangkan untuk WPK yang sudah tidak memiliki Anak Masih Hidup (AMH nol) persentasenya sebesar 41,48 persen. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat 0,3 persen WPK yang melahirkan satu anak (ALH 1) yang anaknya meninggal dunia sehingga tidak memiliki anak lagi. Sementara ALH 1 dengan persentase 16,86 persen mengalami peningkatan sehingga AMH 1 menjadi 17,33 persen disebabkan oleh kematian 0,47 persen anak dari WPK yang memiliki jumlah anak 2, dan begitu seterusnya.

Persentase WPK yang tidak/belum memiliki anak menempati puncak tertinggi, baik pada ALH (41,18 persen) maupun AMH (41,48

persen). Sementara itu, WPK dengan jumlah anak 1, 2 dan 3 menempati jumlah yang hampir sama, yaitu jumlah anak 1 sebesar 16,86 persen (untuk ALH) dan 17,33 persen (untuk AMH); jumlah anak 2 yaitu 15,73 persen (untuk ALH) dan 16,99 persen (untuk AMH); sedangkan jumlah anak 3 sebesar 12,57 persen (untuk ALH) dan 11,73 persen (untuk AMH). Hal ini berarti bahwa di Kabupaten Pinrang, rata-rata WPK memiliki jumlah anak 1, 2, atau 3. Keberhasilan program KB bahwa mayoritas WPK telah menerapkan program 2 anak cukup yang dilakukan berkat kerjasama masyarakat dan pemerintah, atau bisa juga karena terjadinya kematian ALH pada WPK dengan jumlah anak kurang dari 2 atau lebih dari dua.

<https://pinrangkab.bps.go.id>

Pendidikan 2015



6,64 %
BUTA HURUF

VS



93,36 %
MELEK HURUF

MELEK HURUF berarti memiliki kemampuan membaca dan menulis huruf latin maupun huruf lainnya tanpa harus mengerti makna kalimat yang dibaca dan ditulis

Ijazah Tertinggi yang Dimiliki

Tidak /belum pernah sekolah

6,15 %

Tidak punya IJAZAH

22,39 %

IJAZAH SD/MI

27,83 %

IJAZAH SMP/MTS

18,54 %

IJAZAH SMA

16,36 %

3,11 %

IJAZAH SMK

0,25 %

IJAZAH DI/II

0,6 %

IJAZAH DIII

4,77 %

IJAZAH DIV/S1/S2/S3

Mayoritas Penduduk Pinrang Berpendidikan Rendah (SD-SMP)



Sumber : SUSENAS 2014



Bab IV

Pendidikan

Pendidikan menjadi kunci utama bagi kemajuan dan kesejahteraan suatu bangsa. Penyebab mendasar terjadinya keterbelakangan adalah kualitas sumberdaya manusia. Tingkat pendidikan yang rendah di suatu wilayah akan menghambat peran serta masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, politik dan kultural secara lebih efektif (Sen, 1999). Oleh sebab itu pembangunan manusia dalam bidang pendidikan perlu ditingkatkan demi terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan bermartabat.

Menyadari pentingnya pendidikan sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan bangsa yang bermartabat, maka dalam pembukaan UUD 1945, disebutkan bahwasalah satu tujuan negara Indonesia adalah turut mencerdaskan kehidupan bangsa. Upaya untuk meraih tujuan ini ditempuh dengan membentuk berbagai macam program pendidikan, seperti wajib belajar sembilan tahun, program kejar paket A, paket B, paket C, dan sebagainya. Dengan adanya upaya-upaya tersebut, diharapkan pada masa mendatang pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik sehingga kesejahteraan rakyat secara menyeluruh dapat terwujud.

4.1 Angka Melek Huruf (AMH)

Tujuan nasional pendidikan adalah memberantas buta huruf. Indikator keberhasilannya adalah menurunnya angka buta huruf atau dengan kata lain meningkatnya angka melek huruf. Definisi melek huruf adalah kemampuan membaca dan menulis kalimat sederhana dalam huruf latin maupun huruf lainnya tanpa harus mengerti apa yang dibaca atau ditulis.



Gambar 8. Angka Melek Huruf (AMH) dan Angka Buta Huruf (ABH) menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Pinrang Tahun 2015

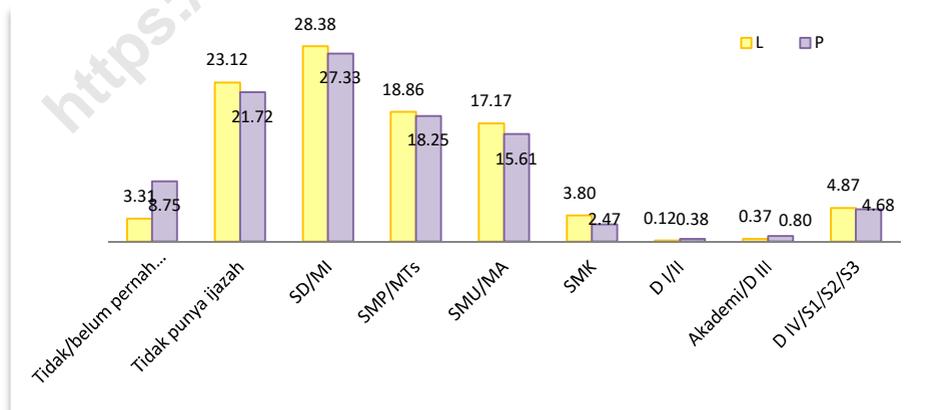
Indikator Angka Melek Huruf (AMH) menunjukkan persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang mampu membaca dan menulis kalimat sederhana dalam huruf latin dan atau huruf lainnya terhadap keseluruhan penduduk usia 15 tahun ke atas. Kemampuan membaca dan menulis merupakan indikator dasar untuk mengukur tingkat pendidikan di suatu wilayah karena membaca dan menulis merupakan dasar utama untuk memperluas pengetahuan. AMH juga menjadi tolok ukur keberhasilan program pengentasan buta huruf yang digalakkan pemerintah, baik pusat maupun daerah.

AMH Kabupaten Pinrang pada tahun 2015 sebesar 93,36 persen. Berdasarkan jenis kelaminnya, AMH laki-laki (96,14 persen) lebih

besar daripada perempuan (90,81 persen). Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat pendidikan laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan sekaligus menunjukkan masih terjadinya diskriminasi pendidikan berdasarkan jenis kelamin. Secara umum AMH Kabupaten Pinrang tahun 2015 menurun dibandingkan tahun 2014 sebesar 0,80 persen. Hal ini menunjukkan keberhasilan pemberantasan buta huruf mengalami penurunan.

4.2 Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Salah satu ukuran kualitas sumber daya manusia adalah tingkat pendidikan yang ditamatkan. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan, semakin bagus kualitas sumber daya manusianya. Sehingga potensi sumber daya manusia dapat dilihat dari jenjang pendidikan yang ditamatkan.



Gambar 9. Persentase Ijazah/STTB yang dimiliki Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas Menurut Jenis Kelamin, 2015

Menurut jenis kelaminnya, laki-laki yang tidak memiliki ijazah, yang memiliki ijazah SD/MI, SMP/MTs, SMU/MA, SMK, DI/II, Akademi/DIII dan D IV/S1/S2/S3 lebih besar dari perempuan (Gambar 9). Sementara perempuan yang tidak/belum pernah sekolah lebih tinggi daripada laki-laki. Tersirat bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan lebih banyak laki-laki yang berhasil menyelesaikan pendidikan. Penduduk yang tidak/belum punya ijazah adalah 22,39 persen dan ini menunjukkan bahwa pada tahun 2015, hampir seperempat penduduk Pinrang tidak lulus SD.

Tabel 3. Persentase Ijazah/STTB yang dimiliki Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas Menurut Jenis Kelamin, 2015

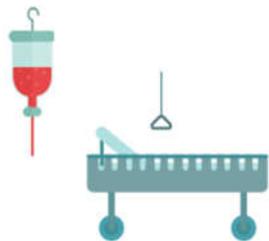
STTB Tertinggi yang dimiliki	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak/belum pernah sekolah	3,31	8,75	6,15
Tidak punya ijazah	23,12	21,72	22,39
SD/MI	28,38	27,33	27,83
SMP/MTs	18,86	18,25	18,54
SMU/MA	17,17	15,61	16,36
SMK	3,80	2,47	3,11
DI/II	0,12	0,38	0,25
Akademi/D III	0,37	0,80	0,60
D IV/S1/S2/S3	4,87	4,68	4,77
Total	100	100	100

Sumber : Susenas, 2015

Semakin tinggi jenjang pendidikan semakin sedikit persentase penduduknya, khusus untuk SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA, dan SMK. Sementara itu, persentase penduduk yang memiliki ijazah DIV/S1/S2/S3 lebih besar daripada DI/II atau Akademi/DIII. Lulusan DIV/S1 lebih banyak dibutuhkan dalam persyaratan lowongan pekerjaan daripada DI/II & Akademi/DIII, sehingga penduduk yang melanjutkan langsung ke D IV/S1.

<https://pinrangkab.bps.go.id>

KESEHATAN 2015



74,57 %



Penduduk
Pinrang
punya
Keluhan
Kesehatan 1
bulan terakhir

Penduduk
Pinrang Tidak
ada Keluhan
Kesehatan 1
bulan
terakhir

25,43 %



5,19%

**PERSALINAN DITOLONG
NON TENAGA MEDIS**



11,52 %

**BAYI TIDAK PERNAH
DIBERI ASI**



3,34 %

BAYI TIDAK DIIMUNISASI



Bab V

Kesehatan

Tingkat kesehatan merupakan indikator penting untuk menggambarkan kualitas pembangunan manusia di suatu wilayah. Kesehatan merupakan keadaan sejahtera dari jiwa dan raga serta kehidupan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif. Masyarakat yang semakin sehat berarti produktifitasnya semakin meningkat. Hal ini akan sangat mendukung proses dan dinamika pembangunan di suatu wilayah.

Guna meningkatkan kesehatan masyarakat, berbagai upaya dilakukan pemerintah baik melalui pembangunan sarana-prasarana kesehatan maupun penyuluhan kesehatan kepada masyarakat. Upaya melalui pendidikan formal diantaranya adalah penerapan program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS). Program-program pembangunan pemerintah di bidang kesehatan berusaha meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat, sehingga setiap penduduk dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau. Hal ini dilakukan dengan pembangunan rumah sakit-rumah sakit, puskesmas, polindes, BKIA, posyandu serta pemenuhan kebutuhan akan tenaga kesehatan dan obat-obatan

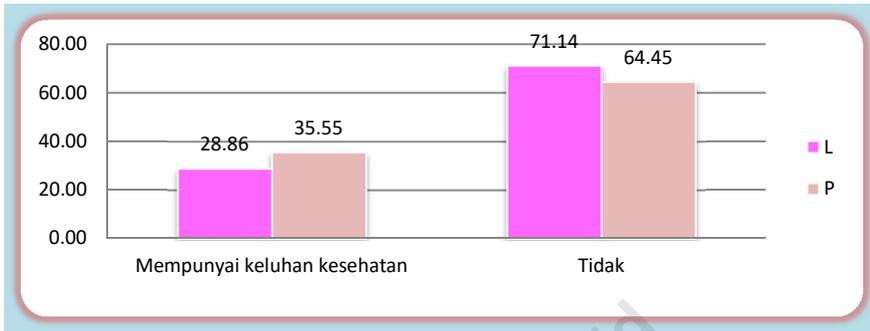
5.1 Angka Kesakitan/ Morbiditas

Angka kesakitan adalah persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan. Keluhan kesehatan adalah gangguan terhadap kondisi fisik maupun jiwa, termasuk karena kecelakaan, atau hal lain yang menyebabkan terganggunya kegiatan sehari-hari. Konsep yang digunakan dalam Susenas, seseorang yang menderita penyakit kronis dianggap mempunyai keluhan kesehatan walaupun pada saat pencacahan orang yang bersangkutan sedang tidak kambuh penyakitnya. Semakin besar angka kesakitan menunjukkan derajat kesehatan masyarakat suatu wilayah semakin rendah.



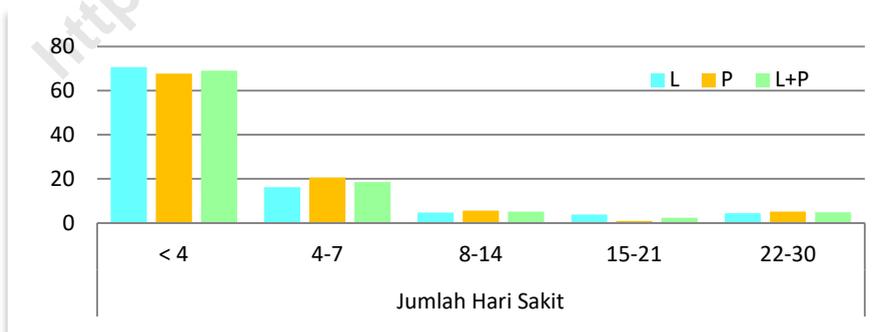
Gambar 10. Persentase Keluhan Kesehatan yang Diderita Selama Sebulan Terakhir, 2015

Gambar 10 menunjukkan 25,43 persen penduduk Kabupaten Pinrang mempunyai keluhan kesehatan. Sehingga angka kesakitan atau morbiditas untuk Kabupaten Pinrang tahun 2015 adalah 25,43 persen. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat/derajat kesehatan masyarakat secara umum sudah cukup baik.



Gambar 11. Persentase Jenis Keluhan Kesehatan yang Diderita Penduduk Selama Sebulan Terakhir Menurut Jenis Kelamin, 2015

Gambar 11 menunjukkan persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan menurut jenis kelamin pada tahun 2015. Perempuan lebih banyak mengalami keluhan kesehatan daripada Laki-laki. Terlihat bahwa persentase perempuan yang mengalami keluhan kesehatan sebesar 35,55 persen sementara laki-laki sebesar 28,86 persen. Secara umum, keluhan kesehatan yang diderita oleh penduduk Pinrang kurang dari 4 hari baik untuk laki-laki maupun perempuan.



Gambar 12. Persentase Penduduk yang Menderita Gangguan Kesehatan Sebulan yang Lalu Menurut Lamanya Hari Gangguan Kesehatan, Jenis Kelamin, 2015

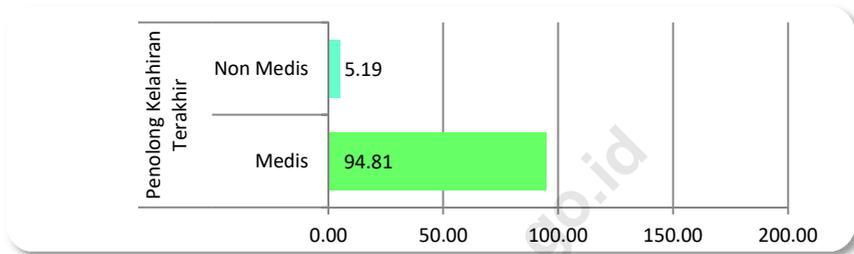
5.2 Penolong Persalinan

Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan barometer pelayanan kesehatan di suatu wilayah. Data terakhir menunjukkan AKI di Indonesia adalah 228 per 100.000 kelahiran hidup. AKI dan AKB erat kaitannya dengan ketersediaan fasilitas dan tenaga kesehatan. Oleh sebab itu, dalam upaya menurunkan AKI dan AKB Indonesia menerapkan program safe motherhood dengan pilar utamanya adalah persalinan aman yang ditolong oleh tenaga kesehatan.

Pada pengumpulan data Susenas, diperoleh informasi tentang penolong kelahiran terakhir. Penolong kelahiran pertama adalah orang yang membantu proses persalinan pertama kali. Sedangkan penolong kelahiran terakhir adalah orang yang membantu proses persalinan hingga bayi dilahirkan. Penolong persalinan pertama dan terakhir dapat berbeda jika penolong kelahiran pertama menemukan masalah dalam persalinan yang tidak dapat ditangani sehingga membutuhkan bantuan untuk penanganan lebih lanjut dalam menangani proses persalinan. Oleh sebab itu, pada umumnya penolong kelahiran terakhir memiliki kemampuan dalam penanganan persalinan yang lebih baik dibandingkan penolong persalinan pertama.

Informasi mengenai penolong kelahiran diperlukan untuk mengetahui sejauh mana pelayanan kesehatan telah menjangkau masyarakat. Standar pelayanan minimal kesehatan 2010-2015 mensyaratkan 90

persen pertolongan persalinan dilakukan oleh Tenaga Medis yang memiliki kompetensi kebidanan.

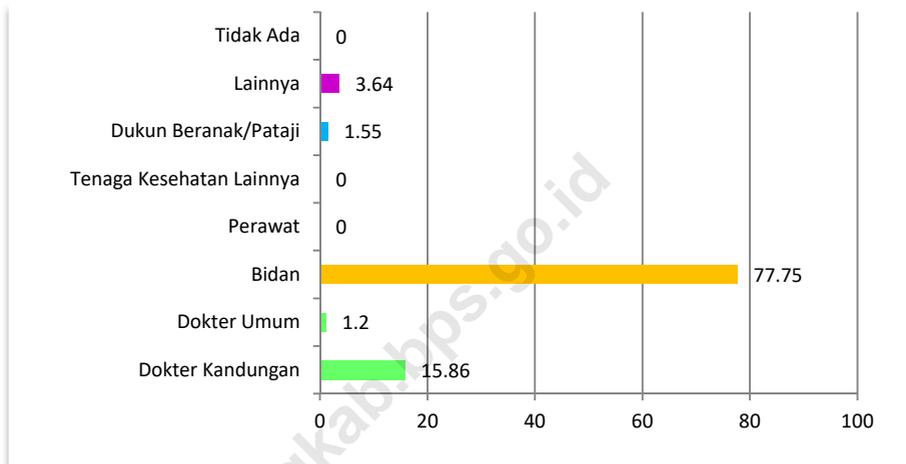


Gambar 13. Persentase Balita Menurut Penolong Kelahiran Terakhir, 2015

Data tahun 2015 menunjukkan bahwa di Kabupaten Pinrang target pelayanan minimal kesehatan 90 persen sudah tercapai. Penolong kelahiran terakhir, yang menggunakan tenaga medis sebesar 94,81 persen, sementara itu tenaga non medisnya adalah sebesar 5,19 persen.

Persentase tertinggi penolong persalinan adalah Bidan yaitu 77,75 persen sebagai penolong kelahiran terakhir. Hal ini disebabkan adanya penugasan Bidan desa yang dapat menjangkau lokasi yang terpencil sekalipun. Yang harus menjadi perhatian adalah masih rendahnya persentase balita yang kelahirannya ditolong oleh dokter karena jumlah dokter, terutama dokter spesialis kandungan di Kabupaten Pinrang masih terbatas. Persentase balita yang kelahirannya ditolong oleh dokter sebagai penolong kelahiran terakhir adalah sebesar 15,86 persen untuk dokter kandungan dan 1,2 persen untuk dokter umum. Di sisi lain persentase balita yang lahir dengan pertolongan lainnya yang

dalam hal ini bisa jadi keluarga, dan sebagainya masih cukup tinggi yaitu 3,64 persen pada.

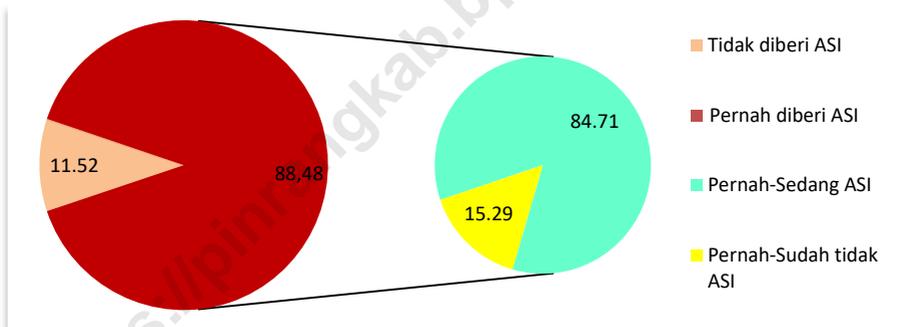


Gambar 14. Persentase Balita Menurut Penolong Kelahiran Terakhir, 2015

5.3 Pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif

ASI merupakan makanan terbaik bagi bayi karena mengandung gizi lengkap yang diperlukan bagi tumbuh kembang bayi. Pemberian ASI pada bayi memiliki manfaat sangat besar untuk jangka panjang bukan hanya memenuhi kebutuhan gizi untuk tumbuh kembang bayi tetapi juga memberi kekebalan terhadap berbagai macam penyakit. Oleh karena itu pemerintah menganjurkan setiap ibu untuk memberikan ASI eksklusif yaitu memberikan ASI kepada bayi sejak dilahirkan sampai menginjak usia enam bulan tanpa makanan dan minuman pralakteal lainnya seperti air gula, air mineral, madu dan sebagainya.

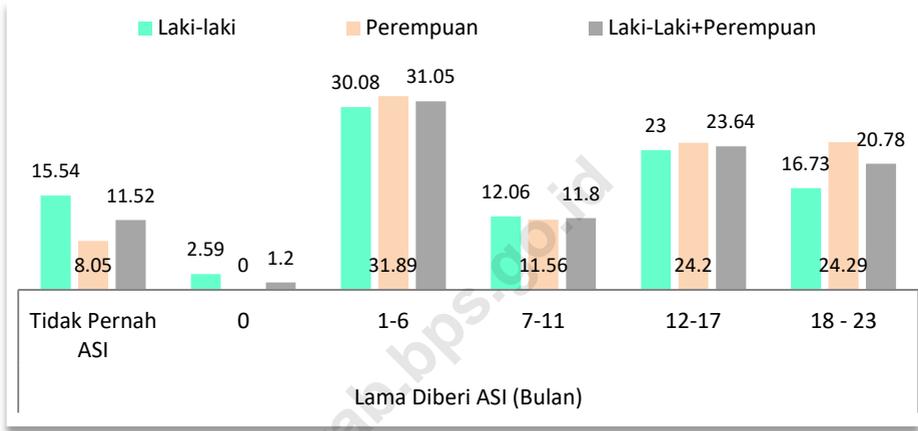
Pemberian ASI eksklusif selama enam bulan dapat mencegah anak dari risiko alergi dan asma. Selain itu ASI merupakan sumber lemak dan vitamin A yang tidak akan tergantikan oleh makanan sapihan apapun. Selanjutnya pemberian ASI tetap dilanjutkan sampai usia dua tahun bersama pemberian makanan tambahan. Banyak ibu yang meragukan kemampuan ASI-nya ketika menginjak tahun kedua menyusui. Padahal pada saat itu, kandungan faktor imunitas ASI, kandungan lemak dan energi meningkat dalam jumlah sangat besar (UNICEF, 2009).



Gambar 15. Persentase Balita umur 0-23 bulan Menurut Pemberian Air Susu Ibu (ASI), 2015

Berdasarkan data Susenas 2015 (Gambar 15), diketahui bahwa 11,52 persen balita umur 0-23 bulan tidak pernah diberikan ASI oleh ibunya, sementara sisanya 88,48 persen balita usia 0-23 bulan mendapatkan ASI dari ibunya. Hal ini berarti bahwa masih banyak ibu yang tidak dapat menyusui bayinya, baik karena alasan ASI tidak berproduksi, maupun memang sengaja tidak ingin memberikan ASI kepada bayinya. Dari 88,48 persen yang pernah diberi ASI, sebanyak 84,71

persennya masih ASI sampai sekarang, sedangkan 15,29 persen sudah tidak mendapatkan ASI lagi.



Gambar 16. Persentase Balita Yang Masih Diberi Air Susu Ibu (ASI) Menurut Lama Diberi ASI dan Jenis Kelamin, 2015

Menurut lama pemberian ASI-nya, balita disusui selama 1-6 bulan memiliki persentase terbesar, yaitu 31,05 persen. Selanjutnya lama pemberian ASI 12-17 bulan sebanyak 23,64 persen, dan terbesar ketiga lama pemberian ASI 18-23 bulan sebesar 20,78 persen. Terlihat bahwa masih ada ibu yang tidak pernah menyusui anaknya yaitu rata-rata 11,52 persen, dimana bayi laki-laki yang tidak disusui 15,54 persen, sedangkan bayi perempuan 8,05 persen. Sementara itu, anak yang disusui kurang dari 1 bulan sebesar 1,2 persen, dengan persentase bayi laki-laki 2,59 persen.

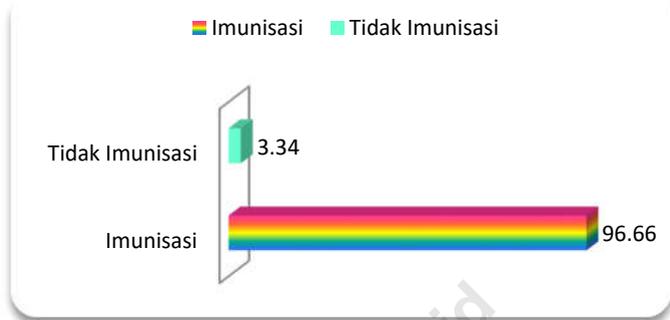
Balita yang tidak mendapatkan ASI eksklusif di Kabupaten Pinrang sebesar 43,77 persen. Angka ini terbilang sangat besar, karena hampir

separoh balita tidak mendapatkan ASI eksklusif. Berarti masih banyak ibu yang tidak mengetahui bahwa ASI eksklusif selama 6 bulan sangat penting untuk bayi, dan di umur tersebut balita belum memerlukan makanan pendamping ASI (MP-ASI).

Balita mulai memerlukan MP-ASI setelah usia 6 bulan. Akan tetapi hingga tepat berumur 2 tahun, ASI juga masih tetap disarankan untuk diberikan kepada balita agar balita mendapatkan nutrisi yang mencukupi dalam masa tumbuh kembangnya. Pada kenyataannya, hanya tersisa sekitar 20 persen saja bayi yang mendapatkan ASI hingga umur 18-23 bulan.

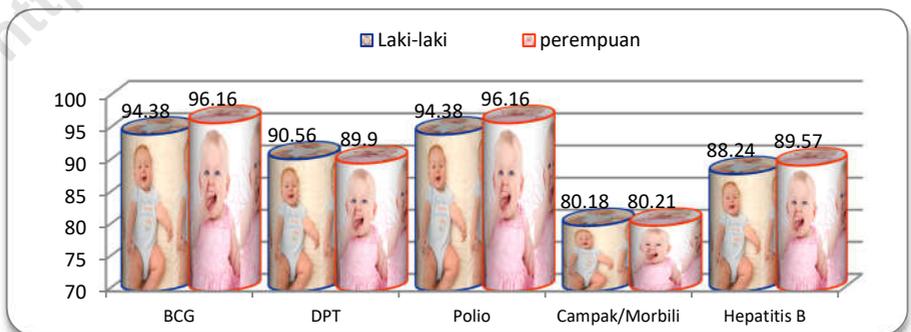
5.4 Imunisasi

Imunisasi merupakan investasi kesehatan masa depan. Pencegahan penyakit melalui imunisasi merupakan cara perlindungan paling efektif, terutama dari segi pembiayaan, karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Program imunisasi nasional pada anak sangat efektif mencegah penyakit dan kematian dari penyakit menular seperti campak, polio dan meningitis. Namun demikian, sampai saat ini masih terdapat masalah-masalah dalam pemberian imunisasi, antara lain pemahaman orang tua yang masih kurang, mitos yang salah tentang imunisasi, serta jadwal imunisasi yang terlambat.



Gambar 17. Persentase Balita Menurut Pemberian Imunisasi, 2015

Sebesar 96,99 persen balita di Kabupaten Pinrang pernah mendapatkan imunisasi, sementara 3,34 persen balita sama sekali tidak pernah diimunisasi. Alasan yang dikemukakan orang tua untuk tidak memberikan imunisasi sebagian besar karena anak sering sakit (misalnya demam dan batuk/pilek) setelah diberikan imunisasi, dan masih ada yang menyatakan karena cemas/takut dan tidak tahu (Juniatiningsih dan Soediby, 2007).



Gambar 18. Persentase Balita Menurut Pemberian Imunisasi dan Jenis Kelamin, 2015

Jenis imunisasi yang paling sedikit diberikan kepada anak adalah imunisasi campak, pada anak laki-laki sebesar 80,18 persen, dan anak perempuan 80,21 persen. Sedangkan untuk jenis imunisasi yang lain, persentase cakupannya berada diatas 85 persen. Penyebab rendahnya cakupan imunisasi campak salah satunya disebabkan karena Kabupaten Pinrang memiliki beberapa wilayah yang cukup terpelosok, sulit dijangkau dengan tingkat pendidikan dan kesadaran masyarakat akan imunisasi yang masih rendah.

KETENAGAKERJAAN

2015

setiap 100 penduduk usia kerja terdapat sekitar 56 orang yang termasuk angkatan kerja (Bekerja dan Pengangguran)

**TPAK
Pinrang
56,30 %**

Menurut Jenis Kelamin



79,61 %



35,27 %

Menurut Wilayah



58,77 %



55,33 %

Pengangguran



4,85 %

Meningkat

pada tahun 2015 di Kabupaten Pinrang dari 100 penduduk berumur 15 tahun keatas yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa (angkatan kerja), sebanyak 4 sampai 5 orang merupakan pengangguran

Yang termasuk Pengangguran:

- orang yang tidak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan
- orang yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha
- orang yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan
- orang yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja

Pengangguran

Di **PEDESAAN LEBIH TINGGI**
daripada Di Perkotaan

10,6 %



1,7 %

Sumber:
Sakernas 2015

<https://pinrangkab.bps.go.id>

Bab VI

Ketenagakerjaan

Salah satu isu penting dalam ketenagakerjaan, di samping keadaan angkatan kerja (*economically active population*) dan struktur ketenagakerjaan adalah isu pengangguran. Dari sisi ekonomi, pengangguran muncul sebagai akibat kesenjangan antara SDM dengan SDA dan ketersediaan lapangan kerja. Jumlah tenaga kerja semakin meningkat seiring pertumbuhan penduduk sedangkan lapangan kerja yang tersedia terbatas, akibatnya pengangguran semakin meningkat. Tingginya angka pengangguran tidak hanya menimbulkan masalah di bidangekonomi, melainkan juga di bidang sosial, seperti kemiskinan dan kerawanan sosial.

Untuk mengatasi persoalan pengangguran, pemerintah harus menyediakan lapangan kerja sesuai pertumbuhan angkatan kerja dengan mendorong pertumbuhan industri-industri yang banyak menyerap tenaga kerja, meningkatkan kualitas SDM agar memenuhi kebutuhan industry, serta mendorong masyarakat memiliki jiwa *entrepreneurship* sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.

Data dan informasi ketenagakerjaan diperlukan oleh penentu kebijakan untuk menyusun strategi dan program ketenagakerjaan dalam rangka pembangunan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan. Bab ini menjelaskan beberapa indikator ketenagakerjaan yang dapat digunakan untuk menggambarkan

kondisi terkini ketenagakerjaan di Kabupaten Pinrang dan bersumber dari bersumber dari hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS).

6.1 Konsep Ketenagakerjaan

Konsep dalam bidang ketenagakerjaan yang digunakan oleh BPS membagi penduduk menjadi dua kelompok besar yaitu penduduk usia kerja dan bukan usia kerja. Penduduk usia kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja terdiri atas angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja meliputi penduduk yang bekerja dan pengangguran. Termasuk dalam kelompok bekerja adalah penduduk usia kerja yang statusnya bekerja, dan sementara tidak bekerja (karena menunggu panen, sedang cuti atau sedang menunggu pekerjaan berikutnya).

Menurut jam kerjanya, penduduk bekerja dibedakan menjadi penduduk yang bekerja sesuai jam kerja normal yaitu minimal 35 jam per minggu dan mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal, atau disebut setengah menganggur. Penduduk yang termasuk dalam kelompok pengangguran adalah mereka yang tidak mempunyai pekerjaan tetapi sedang mencari pekerjaan ataupun mempersiapkan suatu usaha. Termasuk dalam kelompok bukan angkatan kerja adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang kegiatan utamanya bersekolah atau mengurus rumah tangga. Lebih jelasnya, klasifikasi penduduk dalam konsep ketenagakerjaan dijelaskan dalam diagram berikut.



Gambar 19. Diagram Ketenagakerjaan, BPS

6.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara atau wilayah. TPAK diukur sebagai persentase angkatan kerja terhadap seluruh penduduk usia kerja (15 tahun keatas). TPAK adalah salah satu ukuran yang dapat menggambarkan partisipasi penduduk usia kerja yang aktif dalam kegiatan ekonomi. Indikator ini menunjukkan besaran relatif dari pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia untuk memproduksi barang maupun jasa dalam suatu perekonomian.

Berdasarkan gambar 20, dari keseluruhan penduduk usia kerja di Kabupaten Pinrang pada tahun 2015 sebanyak 56,30 persen atau 144.609 jiwa adalah angkatan kerja, sedangkan sisanya yaitu sebanyak 43,70 persen atau 112.251 jiwa bukan termasuk angkatan kerja. Dari 112.251 jiwa bukan angkatan kerja, sebanyak 67,73 persennya (76.033 jiwa) adalah penduduk yang kegiatan utamanya mengurus rumah tangga, sementara yang bersekolah terdapat sebanyak 18,14 persen atau 20.359 jiwa dan lainnya sebanyak 14,13 persen atau 15859 jiwa. Lainnya disini termasuk mereka yang berada dalam usia kerja tetapi tidak dapat bekerja karena cacat dsb.



Gambar 20. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Total, serta Persentase Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin, 2015

TPAK Kabupaten Pinrang tahun 2015 adalah 56,30 persen, artinya dari setiap 100 penduduk usia kerja terdapat sekitar 56 orang yang termasuk angkatan kerja. Angka ini menurun 3,78 persen dibandingkan tahun 2014 (60,08 persen). Sementara itu, menurut jenis kelaminnya, TPAK laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan

yaitu 79,61 persen untuk laki-laki dan 35,27 persen untuk perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar laki-laki usia 15 tahun ke atas aktif secara ekonomi dengan bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Sebaliknya, perempuan lebih banyak yang termasuk dalam bukan angkatan kerja karena menjadi ibu rumah tangga.

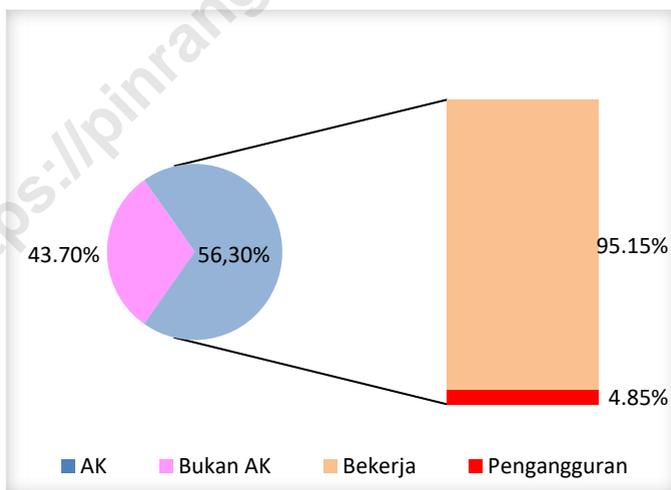
Berdasarkan klasifikasi wilayah, TPAK di Kabupaten Pinrang tahun 2015 untuk daerah perkotaan lebih tinggi (58,77 persen) dibandingkan TPAK perdesaan (55,33 persen). Hal ini berkebalikan dengan kondisi tahun 2014, dimana TPAK wilayah perdesaan justru lebih tinggi dari wilayah perkotaan. TPAK untuk wilayah perkotaan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yaitu dari 58,06 persen pada tahun 2014 menjadi 58,77 persen pada tahun 2015. Demikian sebaliknya untuk wilayah perdesaan mengalami penurunan dari 60,72 persen pada tahun 2014 menjadi 55,33 persen pada tahun 2015. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran tenaga kerja dari perdesaan ke perkotaan (urbanisasi).

Tabel 4. TPAK Kabupaten Pinrang Menurut Wilayah dan Jenis Kelamin, Tahun 2014-2015

Klasifikasi		2014	2015
(1)		(2)	(3)
Jenis Kelamin	Laki-laki	79,44	79,61
	Perempuan	42,64	35,27
Wilayah	Perkotaan	58,06	58,77
	Pedesaan	60,72	55,33

6.3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Gambar 21 menunjukkan dari seluruh penduduk Kabupaten Pinrang 43,70 persen termasuk bukan angkatan kerja, yaitu penduduk yang masih berstatus sekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya. Dari 56,30 persen angkatan kerja, sebesar 95,15 persen adalah penduduk yang bekerja sedangkan 4,85 persen pengangguran. Penduduk yang bekerja meliputi penduduk yang sedang bekerja dan sementara tidak bekerja. Sementara itu, penduduk yang menganggur meliputi pengangguran pernah bekerja, dan pengangguran tidak pernah bekerja.



Gambar 21. Persentase Penduduk 15 Tahun Keatas yang Termasuk Angkatan Kerja, 2015

Angka 4,85 persen merupakan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), yang berarti bahwa pada tahun 2015 dari 100 penduduk 15 tahun keatas di Kabupaten Pinrang, yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa (angkatan kerja), sebanyak 4 sampai 5 orang merupakan pengangguran. Dengan kata lain, terdapat 4,85 persen angkatan kerja di Kabupaten Pinrang yang tidak terserap pasar kerja. Angka ini meningkat dibandingkan tahun 2014 sebesar 2,07 persen. Fenomena ini menyiratkan penurunan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Pinrang pada tahun 2015.

Tabel 5. TPT Kabupaten Pinrang Menurut Wilayah, Jenis Kelamin, dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2015

Kategori		Tidak / Belum Pernah Sekolah	Tidak / blm tamat SD	Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan / <i>Educational Attainment</i>						Jum lah
				SD	SMP	SMU	SMK	DI / II / III Akademi	PT	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Wilayah	Perkotaan	0,0	0,0	0,9	1,4	0,9	11,1	0,0	4,6	1,7
	Pedesaan	0,0	0,0	4,1	23,7	13,4	5,7	18,4	13,6	10,6
Jenis Kelamin	L	0,0	0,0	1,1	6,4	1,9	37,8	0,0	20,8	3,9
	P	0,0	0,0	1,0	6,2	5,1	4,7	26,4	7,6	3,2

Menurut kategori wilayahnya, TPT pedesaan (10,6 persen) lebih tinggi 8,9 persen dibandingkan TPT perkotaan (1,7 persen). Hal ini menunjukkan bahwa angkatan kerja di wilayah pedesaan Kabupaten Pinrang lebih banyak yang tidak terserap di pasar kerja dibandingkan angkatan kerja di pedesaan. Jika dilihat menurut pendidikan tertinggi

yang ditamatkan, TPT terbesar adalah justru pada tamatan SLTP di pedesaan yaitu 23,7 persen, selanjutnya TPT DI/II/III Akademi pedesaan 18,4 persen, kemudian TPT Perguruan Tinggi di Pedesaan 13,6 persen. Dari tabel 5 terlihat bahwa pengangguran justru berasal dari penduduk yang berpendidikan, sementara penduduk yang tidak pernah sekolah dan yang tidak tamat SD seluruhnya bekerja (tidak ada pengangguran dari kalangan penduduk yang tidak pernah/tidak tamat sekolah. Kecuali penduduk yang tamat pendidikan DI/II/III/Akademi di perkotaan seluruhnya juga bekerja.

Menurut jenis kelaminnya, TPT perempuan lebih kecil dari pada TPT laki-laki. Sama halnya dengan klasifikasi TPT menurut pendidikan tertingginya, jika dilihat dari jenis kelamin pun, penduduk yang tidak sekolah maupun yang tidak tamat SD seluruhnya terserap di pasar kerja. Begitu juga dengan penduduk tamatan DI/II/III/Akademi. Hal ini mengindikasikan bahwa pendidikan yang tinggi membuat orang untuk memilih pekerjaan sesuai dengan yang diminati. TPT terbesar menurut jenis kelamin adalah TPT penduduk laki-laki tamatan SMK (37,8 persen), kedua penduduk perempuan tamatan DI/II/III/Akademi (26,4 persen), ketiga laki-laki tamatan perguruan tinggi (20,8 persen), dan keempat penduduk perempuan tamatan perguruan tinggi (7,6 persen). Hal ini mengisyaratkan bahwa tamatan SMK yang diharapkan langsung dapat bekerja justru malah banyak yang menganggur.

Banyaknya penduduk laki-laki yang tidak bekerja disebabkan oleh banyak hal, baik karena tidak sesuai dengan bidangnya, terlalu jauh lokasinya, ketidaksesuaian dengan upah yang didapatkan, maupun

karena memilih tidak bekerja dan menunggu penerimaan PNS saja. Di lain pihak, penduduk perempuan yang memilih menjadi pengangguran dikarenakan tanggung jawab menafkahi rumah tangga ada di tangan laki-laki, sehingga sebagian perempuan memutuskan menjadi ibu rumah tangga saja.

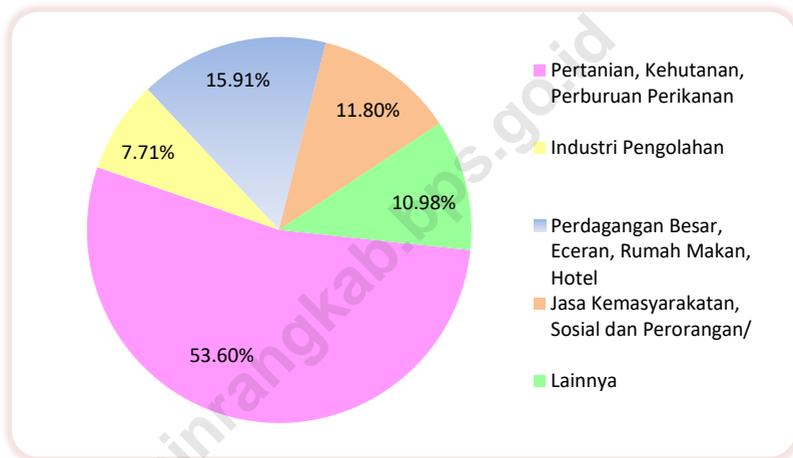
6.4 Bekerja

Konsep bekerja yang digunakan dalam pengumpulan data ketenagakerjaan oleh BPS adalah bekerja minimal satu jam berturut-turut selama seminggu terakhir. Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja di Kabupaten Pinrang pada tahun 2015 adalah 137.591 jiwa. Jumlah tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun 2014, yaitu sebesar 10.519 jiwa.

Distribusi penduduk yang bekerja menurut sektor utama yaitu pertanian, industri, perdagangan, jasa dan lainnya terlihat ada Gambar 23. Pertanian meliputi pertanian tanaman pangan dan pertanian lainnya, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan. Industri pengolahan meliputi pertambangan dan penggalian, listrik, gas dan air, serta bangunan/konstruksi.

Berdasarkan Gambar 22, sebagian besar tenaga kerja di Kabupaten Pinrang pada tahun 2015 yang bekerja di sektor pertanian yaitu sebanyak 53,6 persen. menurut sektornya, sektor dengan penyerapan tenaga kerja dari yang terbesar ke yang terkecil adalah pertama tenaga kerja yang bekerja di sektor perdagangan besar, perdagangan eceran,

rumah makan dan hotel sebesar 15,91 persen. Jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan sebanyak 10,98 persen, sementara yang bekerja di sektor lainnya sebanyak 10,98 persen dan terakhir di sektor industri pengolahan 7,71 persen.



Gambar 22. Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Utama, 2015

Dibandingkan kondisi tahun 2014, terdapat peningkatan distribusi tenaga kerja terutama dari sektor jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan dan sektor lainnya ke bidang pertanian. Kabupaten Pinrang merupakan daerah sentra pertanian, terutama komoditi beras, sehingga sebagian besar tenaga kerja terserap di sektor pertanian. Peningkatan tenaga kerja di sektor pertanian adalah sebesar 5,89 persen. Hal ini disebabkan mayoritas panen padi atau biasa disebut panen raya terjadi pada bulan Agustus pada tahun 2015. Sehingga ketika pencacahan Sakernas ini berlangsung di bulan Agustus, banyak

penduduk yang tengah sibuk dengan lahan pertaniannya. Sementara penduduk yang sebelumnya bekerja pada sektor jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan dan sektor lainnya memanfaatkan keadaan ini untuk mencari pendapatan tambahan.



Gambar 23. Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Wilayah dan Lapangan Usaha Utama, 2015

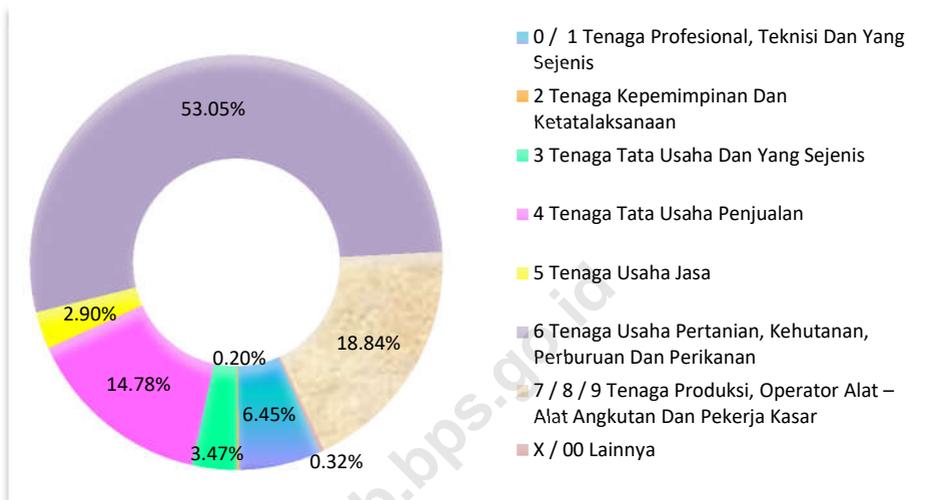
Berdasarkan wilayahnya, distribusi tenaga kerja di sektor pertanian sebagian besar berasal dari pedesaan (88,39 persen). Begitu juga dengan sektor industri pengolahan (73,23 persen) dan sektor jasa kemasyarakatan dan perorangan (52,53 persen). Sementara itu untuk sektor perdagangan besar, eceran, rumah makan, hotel dan sektor lainnya mayoritas penduduk berasal dari wilayah perkotaan. Hal ini sesuai dengan karakteristik pedesaan sebagai gudangnya sektor pertanian serta industri pengolahan. Industri pengolahan di sini adalah industri pengolahan yang berhubungan dengan penggilingan padi

maupun industri rumah tangga yang memproduksi makanan ringan khas daerah Pinrang.



Gambar 24. Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Jenis Kelamin dan Lapangan Usaha Utama, 2015

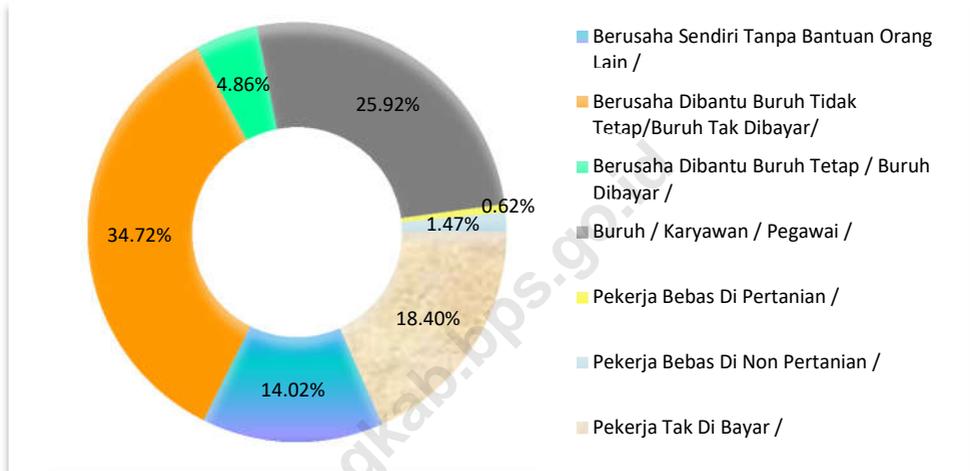
Sementara itu, berdasarkan jenis kelaminnya, sebagian besar tenaga kerja laki-laki bekerja di sektor pertanian 82,59 persen, sektor industri pengolahan 51,39 persen, dan sektor lainnya 87,80 persen. Pekerjaan di sektor pertanian membutuhkan tenaga yang besar, mulai dari pengolahan sawah untuk persiapan penanaman hingga pemanenan, sehingga penduduk laki-laki yang bekerja di sektor pertanian jumlahnya lebih dominan dibandingkan penduduk perempuan yang hanya mencapai 17,41 persen. Sedangkan jasa sebagian besar tenaga kerjanya perempuan (61,45 persen). Pekerjaan di sektor jasa-jasa, terutama jasa kemasyarakatan lebih sesuai bagi perempuan karena sifat perempuan yang lebih teliti dan sabar dalam melayani pengguna jasa.



Gambar 25. Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama, 2015

Distribusi penduduk bekerja di Kabupaten Pinrang tahun 2015 menurut jenis pekerjaan utama ditunjukkan dalam gambar 23. Tenaga usaha pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan memiliki persentase terbesar dalam status pekerjaan utama penduduk yang bekerja, yaitu 53,05 persen. Status dalam pekerjaan utama ini erat kaitannya dengan bidang pekerjaan utama yaitu sektor pertanian. Pertanian menjadi profesi mayoritas penduduk di Kabupaten Pinrang, sehingga tenaga kerja dalam sektor ini pun berjumlah paling besar. Tenaga produksi, operator alat-alat angkutan dan pekerja kasar menempati urutan kedua terbanyak yaitu sebesar 18,84 persen. Status lapangan usaha tersebut masih berhubungan dengan sektor pertanian yang banyak membutuhkan tenaga operator mesin pertanian terutama

pada saat panen, operator alat angkut digunakan untuk membawa padi yang telah dipanen serta pekerja kasar lain

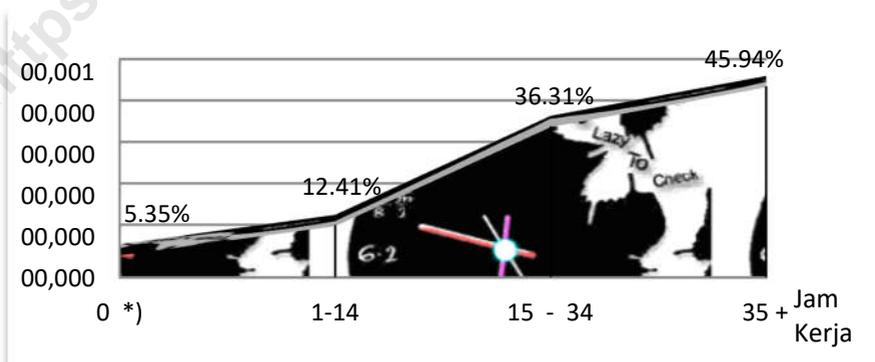


Gambar 26. Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama, 2015

Sementara menurut jenis pekerjaan utamanya, mayoritas penduduk di Kabupaten Pinrang berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar (34,72 persen), buruh/karyawan/pegawai (25,92 persen) dan pekerja tak dibayar (18,04 persen). Masih sama dengan jenis pekerjaan utama, bahwa menurut status pekerjaan utamanya, berusaha dibantu buruh tidak dibayar adalah terkait sektor pertanian yang mayoritas mengusahakan lahan pertanian dengan dibantu anggota keluarga yang merupakan pekerja tak dibayar (pekerja keluarga).

6.5 Jumlah Jam Kerja

Terkait dengan jumlah jam kerja yang dihabiskan selama seminggu, dapat diperoleh indikator pengangguran terselubung atau setengah pengangguran yaitu bagian dari angkatan kerja yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu). Proporsi jumlah penduduk setengah pengangguran bermanfaat untuk dijadikan acuan pemerintah dalam rangka meningkatkan tingkat utilisasi, kegunaan, dan produktivitas pekerja. Semakin tinggi tingkat setengah pengangguran maka semakin rendah tingkat utilisasi pekerja dan produktivitasnya. Akibatnya, pendapatan mereka pun rendah dan tidak ada jaminan sosial atas mereka. Hal ini sering terjadi di sektor informal yang rentan terhadap kelangsungan pekerja, pendapatan dan tidak tersedianya jaminan sosial. Sehingga pemerintah perlu membuat kebijakan untuk meningkatkan kemampuan bekerja mereka, misalnya menambah balai latihan kerja.



Gambar 27. Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja Selama Seminggu, 2015

Menurut jumlah jam kerja selama seminggu, diketahui bahwa 45,94 persen pekerja di Kabupaten Pinrang pada tahun 2015 bekerja 35 jam atau lebih, 36,31 persen bekerja antara 15 sampai 34 jam, 12,41 persen bekerja 1 sampai 14 jam, dan sisanya 5,35 persen sementara tidak bekerja selama seminggu yang lalu. Dengan demikian tingkat pengangguran terselubung di Kabupaten Pinrang pada tahun 2015 adalah 54,6 persen. Tingkat pengangguran terselubung yang cukup tinggi ini kemungkinan dipengaruhi oleh tingginya pekerja keluarga dan pekerja bebas seperti yang telah dibahas pada gambar 27.

Fasilitas Perumahan di Kab. Pinrang 2015



Bab VII

Fasilitas Perumahan

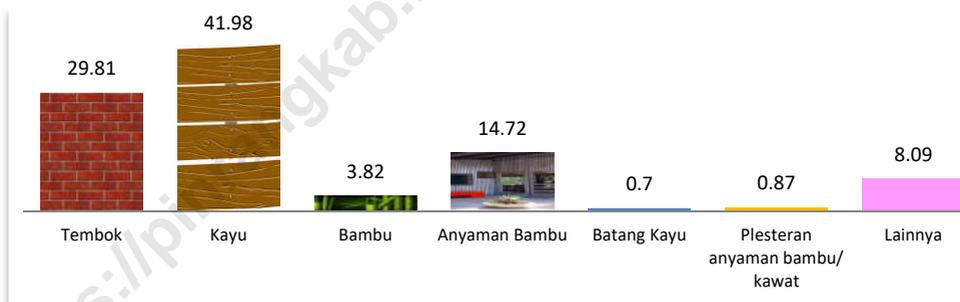
Rumah merupakan kebutuhan dasar manusia selain sandang, pangan, dan kesehatan. Pentingnya rumah dapat dilihat dari fungsinya sebagai tempat tinggal, tempat istirahat, tempat berlindung dari hujan dan panas serta tempat berlangsungnya proses sosialisasi bagi semua anggota rumah tangga. Keberadaan rumah dan fasilitasnya dapat mempengaruhi tingkat kesehatan anggota rumah tangga sekaligus menunjukkan tingkat kesejahteraan penghuninya. Semakin baik rumah dan fasilitas yang dimiliki, dapat diasumsikan semakin baik pula tingkat kesehatan dan tingkat kesejahteraan penghuninya. Bab ini akan menyajikan beberapa aspek mendasar dari rumah yang berkaitan dengan struktur bangunan perumahan dan fasilitas perumahan tersebut.

7.1 Kualitas Rumah Tinggal

Rumah yang berkualitas adalah rumah yang memenuhi syarat tertentu dilihat dari beberapa aspek, seperti luas lantai per kapita, jenis lantai, dinding dan atap yang digunakan. Rumah yang dikategorikan sebagai rumah layak huni sebagai tempat tinggal harus memenuhi beberapa persyaratan. Diantara persyaratan itu adalah dinding terluas terbuat dari tembok atau kayu, atap dari beton, genteng, sirap, seng ataupun asbes, dan memiliki lantai terluas bukan tanah.

7.1.1 Jenis Dinding Rumah

Dalam publikasi ini dinding layak huni adalah dinding yang berbahan tembok dan kayu serta tidak lembab dan tidak tembus angin.. Data tahun 2015 menunjukkan sebesar (71,79 persen) penduduk Kabupaten Pinrang sudah tinggal di dalam rumah dengan dinding yang layak. Mayoritas rumah penduduk Kabupaten Pinrang memiliki jenis dinding kayu yaitu sebanyak 41,98 persen (Gambar 28). Hal ini sesuai dengan rumah adat suku Bugis yang merupakan suku bangsa mayoritas di Kabupaten Pinrang.



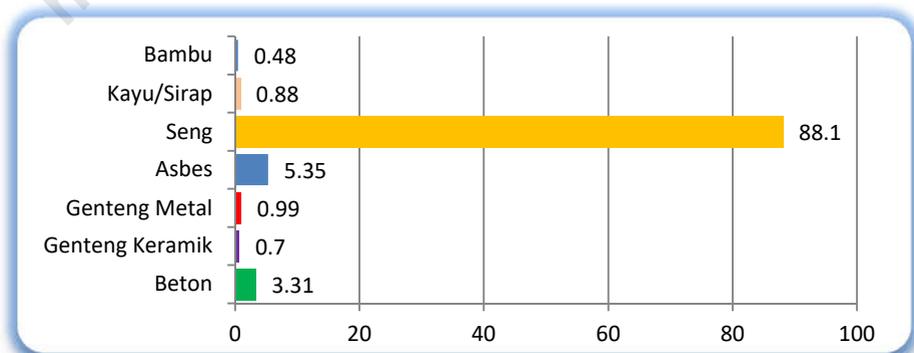
Gambar 28. Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Dinding Terluas, 2015

Akibat harga kayu yang semakin mahal dan produksi kayu yang semakin menurun, sebagian penduduk beralih membangun rumah dengan dinding tembok. Pada tahun 2015 persentase rumah dengan dinding tembok di Kabupaten Pinrang adalah 29,81 persen, angka ini meningkat 3,5 persen dibandingkan tahun 2014 yaitu 26,31 persen. Penggunaan kayu sebagai dinding rumah pun sedikit meningkat, yaitu sebesar 1,08 persen jika dibandingkan tahun 2014 yang hanya mencapai 40,90 persen. Bahan lain yang banyak digunakan sebagai

dinding di Kabupaten Pinrang adalah anyaman bambu sebanyak 14,72 persen dan dinding lainnya termasuk seng, sebanyak 8,09 persen. Jenis dinding bambu dan seng, biasanya digunakan oleh rumah tangga yang kurang mampu mengingat biaya yang dikeluarkan untuk membeli kedua jenis material tersebut lebih murah dari pada dinding kayu dan tembok.

7.1.2 Jenis Atap

Salah satu fungsi atap adalah untuk melindungi penghuni rumah dari cuaca panas dan hujan. Berdasarkan gambar 26, mayoritas rumah tangga di Kabupaten Pinrang tinggal di dalam rumah yang menggunakan atap layak (beton, genteng, seng, sirap, asbes) sebesar 99,33 persen. Jenis atap seng paling banyak digunakan oleh penduduk Kabupaten Pinrang mencapai lebih dari 85 persen, karena atap jenis ini paling sesuai dengan konstruksi rumah panggung yang berdinding kayu.

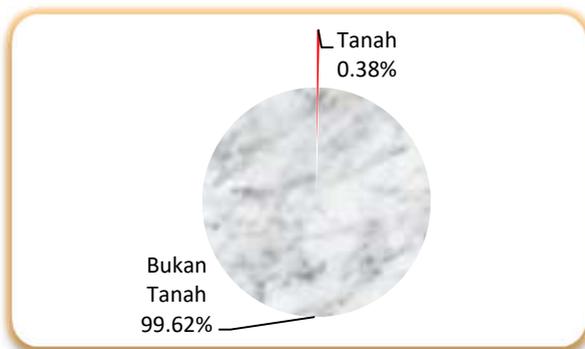


Gambar 29. Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Atap Terluas, 2015

Persentase rumah tangga dengan jenis atap rumah terluas setelah seng adalah asbes yang digunakan oleh 5,35 persen rumah tangga, dan beton yang digunakan oleh 3,31 persen rumah tangga.

7.1.3 Jenis dan Luas Lantai

Jenis lantai rumah dapat mempengaruhi kondisi kesehatan anggota rumah tangga. Mayoritas rumah tangga di Kabupaten Pinrang memiliki jenis lantai terluas bukan tanah yaitu sebanyak 99,62 persen. Persentase rumah tangga dengan jenis lantai bukan tanah menurun 0,21 persen jika dibandingkan tahun sebelumnya. Lantai bukan tanah terdiri dari marmer/granit (1,48 persen), keramik (13,66 persen), ubin/tegel/teraso (6,6 persen), kayu/papan kualitas tinggi (21,93 persen), semen/bata merah (15,13 persen), bambu (0,16 persen), kayu/papan kualitas rendah (40,26 persen), dan lainnya (0,4 persen). Masih terdapat 0,38 persen rumah tangga yang tinggal di dalam rumah yang berlantai tanah.



Gambar 30. Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Lantai Terluas, 2015

Selain Jenis lantai yang digunakan, luas lantai rumah per kapita menentukan tingkat kesehatan penghuninya karena luas lantai yang sempit dapat mengurangi konsumsi oksigen dan mempercepat proses penularan penyakit. Luas lantai per kapita merupakan indikator untuk menghitung rumah kumuh. Semakin besar luas lantai per kapita, semakin baik tingkat kesejahteraan rumah tangga di wilayah tersebut. Luas lantai per kapita adalah luas lantai rumah dibagi dengan jumlah anggota rumah tangga (ART). Dengan asumsi, setiap rumah tangga terdiri dari 5 ART dan menurut UU Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan, luas hunian minimum rumah adalah 36 m², maka luas minimum perkapita adalah 7,2 m².

7.2 Fasilitas Rumah

Ketersediaan fasilitas rumah menentukan kenyamanan penghuninya, tingkat kesehatan, dan kemudahan dalam beraktivitas. Fasilitas yang penting agar rumah menjadi nyaman dan sehat untuk dijadikan tempat tinggal antara lain tersedianya air minum bersih, sumber penerangan listrik, serta memiliki kloset sendiri dengan tangki septik/SPAL.

7.2.1 Air Minum Bersih

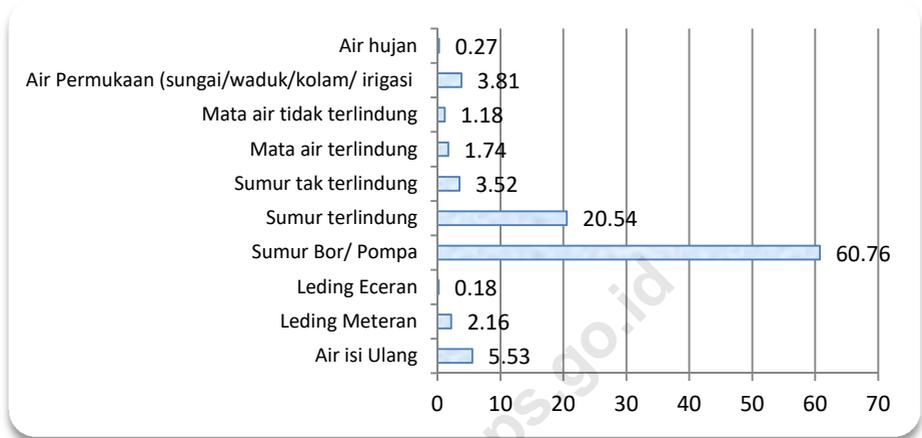
Salah satu fasilitas yang harus dipenuhi sebagai syarat dari rumah sehat adalah air minum bersih. Sumber air minum yang termasuk kategori air bersih yaitu air ledeng, air hujan, sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung. Khusus untuk sumur bor/pompa,

sumur terlindung, dan mata air terlindung harus berjarak 10 meter atau lebih dari tempat penampungan tinja/limbah/kotoran terdekat agar dapat dikatakan layak. Pada Tahun 2015 sebagian besar penduduk Kabupaten Pinrang (95,49 persen) telah menggunakan sumber air minum bersih atau meningkat sekitar 31,21 persen dibanding tahun 2014. Sementara itu 4,51 persen tidak mendapatkan air bersih.



Gambar 31. Persentase Rumah Tangga Menurut Penggunaan Air Minum, 2015

Kualitas air bersih dapat dilihat dari sumbernya. Sumber air minum menurut derajat kualitasnya berturut-turut adalah air kemasan/isi ulang, leding, pompa, sumur (sumur terlindung dan sumur tak terlindung), mata air (mata air terlindung dan mata air tak terlindung), air sungai dan lainnya. Untuk rumah tangga yang menggunakan sumber air minum dari pompa, sumur terlindung, sumur tak terlindung, mata air terlindung, mata air tak terlindung harus memperhatikan jarak, dari tempat pembuangan akhir tinja. Jarak yang terbaik adalah diatas 6 meter dari tempat pembuangan tinja. Persentase terbesar sumber air untuk memasak yang dipakai oleh penduduk di Kabupaten Pinrang pada tahun 2015 adalah sumur bor/pompa sebesar 60,76 persen.

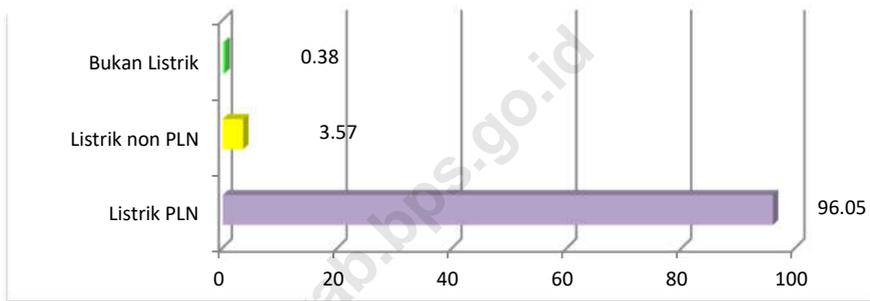


Gambar 32. Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air untuk Memasak, 2015

7.2.2 Sumber Penerangan Listrik

Sumber penerangan yang dapat digunakan sebagai fasilitas penerangan diantaranya listrik (PLN dan non PLN), petromak, aladin, pelita, sentir, obor dan lainnya. Listrik merupakan sarana yang cukup penting untuk rumah tangga yaitu sebagai sumber penerangan dan merupakan kebutuhan penting masyarakat. Pengguna listrik di Kabupaten Pinrang terdiri atas 96,05 persen listrik PLN, 3,57 persen listrik non PLN dan 0,38 persen bukan listrik. Listrik non PLN umumnya digunakan oleh rumah tangga di daerah yang memiliki akses terbatas seperti beberapa desa di Kecamatan Lembang. Listrik non PLN umumnya bersumber dari swadaya masyarakat atau bantuan lembaga internasional. Sumber tenaga listrik non PLN di Kabupaten Pinrang adalah kincir air. Masih terdapat 0,38 persen rumah tangga

yang tidak menggunakan listrik di Kabupaten Pinrang pada tahun 2015. Beberapa wilayah di Kabupaten Pinrang yang tergolong daerah sulit memang belum terjangkau listrik. Sehingga untuk kehidupannya mereka masih menggunakan penerangan tradisional.



Gambar 33. Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan Listrik, 2015

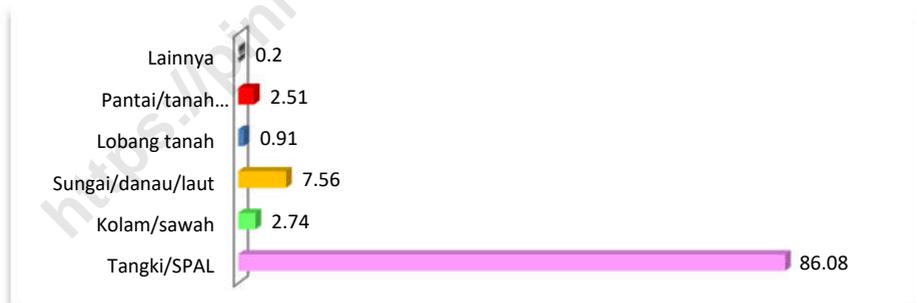
7.2.3 Tempat Pembuangan Tinja

Sistem pembuangan tinja erat kaitannya dengan tanggung jawab dalam pemeliharaan dan kebersihan rumah tangga. Sistem pembuangan tinja sangat mempengaruhi kualitas lingkungan di sekitar tempat tinggal rumah tangga tersebut. Kriteria akses terhadap sanitasi layak adalah penggunaan fasilitas tempat Buang Air Besar (BAB) milik sendiri atau bersama, menggunakan kloset dan tempat pembuangan akhir tinjanya berupa tangki septik atau sarana pembuangan air limbah (SPAL).

Dari beberapa jenis kloset, hanya ada dua jenis kloset yang digunakan penduduk Kabupaten Pinrang Tahun 2015 yaitu kloset leher angsa dan

plengsengan. Kloset Leher Angsa merupakan kloset leher lubang closet berbentuk lengkungan, dengan demikian akan terisi air gunanya sebagai sumbat sehingga dapat mencegah bau busuk serta masuknya binatang-binatang kecil. Kloset model ini adalah model yang terbaik yang dianjurkan dalam kesehatan lingkungan. Kloset leher angsa digunakan oleh mayoritas rumah tangga (99,34 persen).

Berdasarkan data Susenas 2015 penggunaan kloset leher angsa sebesar 99,34 persen, kloset plengsengan 0,37 persen dan hanya 0,28 persen rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas pembuangan air besar. Dengan kata lain penggunaan fasilitas pembuangan air besar di Kabupaten Pinrang Tahun 2015 sebagian besar menggunakan jenis kloset yang sehat.



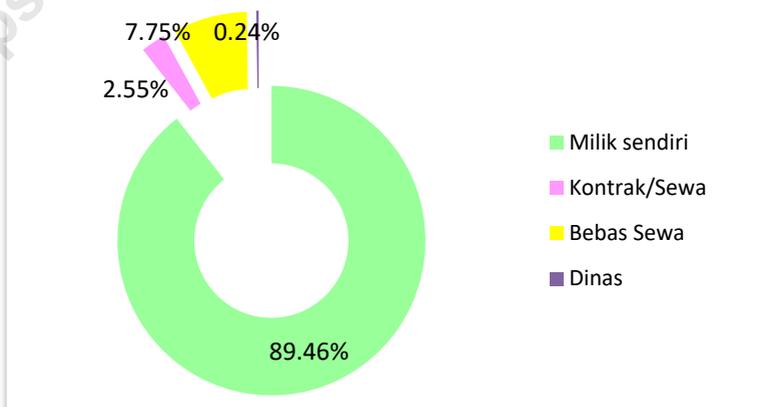
Gambar 34. Persentase Rumah Tangga Menurut Tempat Pembuangan Akhir Tinja, 2015

Tempat pembuangan akhir tinja yang digunakan sebagian besar rumah tangga (86,08 persen) telah menggunakan tangki/SPAL. Sementara itu, 13,92 persen rumah tangga masih belum memiliki pembuangan akhir tinja yang layak. Dampak serius membuang kotoran yang tidak

sehat menyebabkan pencemaran tanah, air dan udara sehingga mempengaruhi kualitas lingkungan dan pada akhirnya mempengaruhi kesehatan anggota rumah tangga.

7.3 Status Kepemilikan Rumah

Salah satu indikator yang digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan dan peningkatan taraf hidup masyarakat adalah status kepemilikan rumah tinggal. Kondisi ekonomi rumah tangga sangat mempengaruhi status kepemilikan tempat tinggal. Status kepemilikan rumah menurut data susenas dikelompokkan menjadi lima macam yaitu milik sendiri, sewa/kontrak, bebas sewa, dinas dan lainnya. Rumah tangga yang menempati rumah tinggal milik sendiri dikatakan telah mampu memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal yang terjangkau dan permanen dalam jangka panjang.



Gambar 35. Persentase Rumah Tangga Menurut Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal, 2015

Sebagian besar penduduk Kabupaten Pinrang telah memiliki rumah dengan status milik sendiri yaitu sebanyak 89,46 persen. Untuk status kepemilikan rumah tinggal kontrak/sewa, sebanyak 2,55 persen. 7,75 persen rumah tangga menempati rumah tinggal bebas sewa milik orang lain dan 0,24 persen rumah tangga menempati rumah dengan status dinas.

<https://pinrangkab.bps.go.id>

Indikator Kesejahteraan Rakyat 2016

<https://pinrangkab.bps.go.id>

Bab VIII

Konsumsi Rumah Tangga dan Kemiskinan

Masalah kemiskinan merupakan masalah mendasar yang harus diselesaikan oleh pemerintah dari tingkat pusat hingga daerah. Penanggulangan kemiskinan memerlukan langkah-langkah strategis dan sistemik yang komprehensif dengan melibatkan berbagai pihak. Salah satu kebijakan pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan adalah dengan program perlindungan sosial. Perlindungan sosial merupakan bagian dari “Nawa Cita” atau Sembilan agenda perubahan yang dicanangkan pemerintah yaitu mengenai peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar warga miskin dan peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat miskin. Selain itu berbagai program pembangunan juga diluncurkan untuk penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat serta melaksanakan percepatan pembangunan daerah tertinggal.

Penanganan kemiskinan perlu didukung oleh data yang berkualitas. Hingga saat ini BPS bertugas untuk mengumpulkan data kemiskinan makro dan mikro. Data kemiskinan makro adalah data persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, sementara data kemiskinan mikro adalah data yang menunjukkan nama dan alamat rumah tangga miskin. Data kemiskinan mikro digunakan untuk menentukan sasaran program-program

penanggulangan kemiskinan. Sementara itu, data kemiskinan makro lebih banyak digunakan untuk mengevaluasi kebijakan penanggulangan kemiskinan, menentukan target dalam perencanaan pembangunan untuk pengentasan kemiskinan, serta membandingkan kondisi kemiskinan antar waktu dan antar daerah.

Pengukuran kemiskinan makro yang dilakukan oleh BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dengan pendekatan pengeluaran rumah tangga karena data pendapatan yang akurat sulit diperoleh. Pada publikasi ini akan ditampilkan hasil penghitungan kemiskinan makro yang dihasilkan dari data konsumsi/pengeluaran yang dikumpulkan melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS).

8.1 Pengeluaran Konsumsi Makanan dan Non Makanan

Menurut pendekatan kebutuhan dasar, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan (GK). Secara teknis GK dibangun dari dua komponen, yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non makanan (GKNM). GKM merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari; sedangkan GKNM merupakan

kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan.



Gambar 36. Persentase Konsumsi makanan dan non makanan penduduk Kabupaten Pinrang Tahun 2013-2015

Data persentase konsumsi makanan terhadap total pengeluaran pada periode 2013-2015 menunjukkan kecenderungan menurun. Sebaliknya, untuk persentase konsumsi non makanan justru meningkat. Kondisi ini menunjukkan adanya perubahan pola konsumsi dari komoditi makanan ke non makanan yang dapat menjadi indikasi terjadinya peningkatan kesejahteraan.

Pada tahun 2015 rata-rata konsumsi per kapita sebulan rumah tangga di Kabupaten Pinrang adalah Rp 819.865,-. Nilai konsumsi per kapita sebulan pada tahun 2015 tersebut melebihi rata-rata konsumsi Provinsi Sulawesi Selatan yang sebesar Rp 746.767,- dan merupakan urutan keenam tertinggi diantara 24 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Pada tahun 2015 rata-rata konsumsi makanan per-kapita sebulan rumah tangga di Kabupaten Pinrang adalah sebesar Rp 374.025,- atau 45,62 persen dari total pengeluaran. Mengalami

penurunan 2,24 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Sejak tahun 2013 persentase konsumsi makanan menurun secara signifikan. Sebaliknya, persentase pengeluaran non makanan dari tahun 2013 hingga tahun 2015 menunjukkan peningkatan hampir sekitar dua poin setiap tahunnya. Pada tahun 2015, rata-rata pengeluaran non-makanan per-kapita sebulan rumah tangga di Kabupaten Pinrang adalah Rp 445.840,- atau 54,38 persen dari total pengeluaran rumah tangga.

Tabel 6. RATA-RATA PENGELUARAN PER KAPITA SEBULAN (RUPIAH) MENURUT KELOMPOK BARANG DAN DAERAH TEMPAT TINGGAL, MARET 2015
MONTHLY AVERAGE EXPENDITURE PER CAPITA (RUPIAHS) BY COMMODITY GROUP AND URBAN RURAL CLASSIFICATION, MARCH 2015

Kabupaten / Regency : Pinrang

Kelompok Barang <i>Community Group</i>	Perkotaan Urban	Perdesaan Rural	Perkotaan + Perdesaan <i>Urban + Rural</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
A. MAKANAN / FOOD			
1. Padi-padian / <i>Cereals</i>	60.656	68.504	66.582
2. Umbi-umbian / <i>Tubers</i>	1.276	1.213	1.228
3. Ikan/udang/cumi/kerang <i>Fish/shrimp/common squid/shells</i>	55.137	51.279	52.224
4. Daging / <i>Meat</i>	6.999	4.522	5.129
5. Telur dan Susu / <i>Eggs and milk</i>	30.122	27.420	28.082
6. Sayur-sayuran / <i>Vegetables</i>	16.630	15.803	16.006
7. Kacang-kacangan / <i>Legumes</i>	5.553	4.497	4.756
8. Buah-buahan / <i>Fruits</i>	23.224	27.450	26.415

9.	Minyak dan kelapa / <i>Oil and coconut</i>	10.615	10.926	10.850
10.	Bahan Minuman / <i>Beverages stuffs</i>	10.741	14.181	13.338
11.	Bumbu-bumbuan / <i>Spices</i>	5.677	6.505	6.302
12.	Konsumsi lainnya <i>Miscellaneous food items</i>	8.540	12.533	11.555
13.	Makanan dan Minuman jadi <i>Prepared food and beverages</i>	119.360	72.547	84.014
14.	Rokok / <i>Cigarettes</i>	63.027	42.522	47.545

JUMLAH MAKANAN <i>TOTAL OF FOOS</i>	417.557	359.902	374.025
---	---------	---------	---------

B. BUKAN MAKANAN / NON FOOD

1.	Perumahan dan fasilitas rumah tangga <i>Housing and household facilities</i>	246.942	172.045	190.391
2.	Aneka barang dan jasa <i>Goods and services</i>	93.339	92.082	92.390
3.	Pakaian, alas kaki dan tutup kepala <i>Clothing, footwear, headgear</i>	36.139	22.857	26.111
4.	Barang tahan lama / <i>Durable goods</i>	80.722	103.242	97.725
5.	Pajak, pungutan dan asuransi <i>Tax and insurance</i>	21.738	14.642	16.380
6.	Keperluan pesta dan upacara/kenduri <i>Parties and ceremonies</i>	3.222	29.209	22.843

JUMLAH BUKAN MAKANAN <i>TOTAL OF NON FOOD</i>	482.103	434.076	445.840
---	---------	---------	---------

JUMLAH / TOTAL	899.660	793.977	819.865
-----------------------	---------	---------	---------

8.2 Penduduk Miskin

Menurut Bappenas miskin adalah kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar tersebut antara lain: terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik. Definisi tersebut diterjemahkan dalam konsep kemiskinan makro yang dilakukan oleh BPS sebagai rumah tangga yang pengeluaran per-kapita sebulan lebih rendah dibandingkan garis kemiskinan (GK).

Garis kemiskinan Kabupaten Pinrang tahun 2014 adalah Rp 228.150,- meningkat 2,9% dibandingkan tahun 2013 yang sebesar Rp 221.717,-. Kenaikan garis kemiskinan dipicu oleh kenaikan harga-harga komoditi makanan maupun non makanan di Kabupaten Pinrang sebagai dampak adanya fluktuasi harga BBM, kenaikan harga komoditi dunia, penurunan nilai tukar yang berdampak pada harga barang impor dan sebagainya. Pada tahun 2014, persentase penduduk miskin di Kabupaten Pinrang justru mengalami penurunan 7,4% yaitu dari 8,86% atau 32.011 jiwa pada tahun 2013 menjadi 8,2% atau 29.855 jiwa pada tahun 2014. Kenaikan garis kemiskinan pada umumnya akan diikuti peningkatan persentase penduduk miskin terutama jika kenaikan garis kemiskinan akibat kenaikan harga tidak diimbangi oleh kenaikan pendapatan masyarakat. Kondisi pada tahun 2014

menunjukkan bahwa gejolak ekonomi yang terjadi tidak berimbas pada kenaikan kemiskinan karena diimbangi oleh pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.



Gambar 37. Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Pinrang Tahun 2009-2014

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.

Tabel 7. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Pinrang Tahun 2012-2014

Tahun	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahahan Kemiskinan (P2)
(1)	(2)	(3)
2012	1.37	0.40
2013	1.16	0.22
2014	1.00	0.17

Pada periode 2012-2014 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahahan Kemiskinan (P2) mengalami penurunan. Indeks Kedalaman Kemiskinan turun dari 1,37 pada tahun 2012 menjadi 1,16 pada tahun 2013 dan turun lagi menjadi 1.00 pada tahun 2014. Demikian pula indeks keparahan kemiskinan, pada tahun 2014 sebesar 0.17 lebih rendah dari tahun 2013 sebesar 0,22 serta lebih rendah pula dibandingkan tahun 2012 yang sebesar 0,40. Penurunan nilai kedua indeks ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin mendekati Garis Kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit.

<https://pinrangkab.bps.go.id>



Indikator Kesejahteraan Rakyat 2016

<https://pinrangkab.bps.go.id>

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik, Bappenas, UNFPA. 2012. Proyeksi Penduduk Indonesia 2000-2035. Badan Pusat Statistik, Jakarta.
- 2013. Proyeksi Penduduk Indonesia 2000-2035. Badan Pusat Statistik, Jakarta.
-2014. Proyeksi Penduduk Indonesia Umur Tertentu dan Umur Satu Tahunan 2010-2025. Badan Pusat Statistik, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang. 2015. Indikator Kesejahteraan Rakyat 2014. Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang: Pinrang.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang. 2014. Indikator Kesejahteraan Rakyat 2014. Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang: Pinrang.



DATA
MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN PINRANG**

Jl. Andi Isa No. 18, Pinrang, Sulawesi Selatan 91211

Telp./Fax : (0421) 921021

E-mail : bps7315@bps.go.id

Homepage : pinrangkab.bps.go.id

ISBN 978-602-6027-40-8

